

**SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL
DAERAH SUMATRA SELATAN**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DAERAH SUMATRA SELATAN

Penulis :
Zulyani Hidayah
Hari Radiawan

Penyempurna :
Sri Mintosih

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBUDAYAAN NUSANTARA
1993

KATA PENGANTAR

Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melakukan penelitian tentang Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan, yang isinya tentang Kepemimpinan Tradisional di lingkungan masyarakat asli di Kabupaten Lahat.

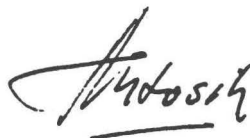
Nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah ini adalah nilai kepemimpinan yang dapat menunjang pembangunan, baik fisik maupun spirituil.

Kami menyadari bahwa buku ini masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Oleh krena itu, semua saran untuk perbaikan yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati.

Harapan kami, semoga buku ini dapat merupakan sumbangan yang berarti dan bermanfaat serta dapat menambah wawasan budaya bagi para pembaca.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peneliti dan semua pihak atas jerih payah mereka yang telah membantu terwujudnya buku ini.

Jakarta, Juli 1993
Pemimpin Bagian Proyek Penelitian
Dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sri Mintosih', with a horizontal line underneath the name.

Sri Mintosih
NIP. 130 358 048

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Usaha untuk mengetahui dan memahami kebudayaan daerah lain selain kebudayaan daerahnya sendiri baik lewat karya-karya sastra tradisional maupun dalam wujud kebudayaan yang lain merupakan sikap terpuji dalam rangka perwujudan integrasi nasional. Keterbukaan sedemikian itu akan membantu anggota masyarakat untuk memperluas cakrawala pandangannya.

Untuk membantu mempermudah pembinaan saling pengertian dan memperluas cakrawala budaya dalam masyarakat majemuk itulah pemerintah telah melaksanakan berbagai program, baik dengan menerbitkan buku-buku yang bersumber dari naskah-naskah nusantara, maupun dengan usaha-usaha lain yang bersifat memperkenalkan kebudayaan daerah pada umumnya. Salah satu usaha itu adalah Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara. Mengingat arti pentingnya usaha tersebut, saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku yang berjudul **Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatra Selatan**.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini. Maka penggalan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah tradisional maupun dalam wujud kebudayaan yang lain yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia dapat ditingkatkan

sehingga tujuan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang sedang kita laksanakan dapat segera tercapai.

Namun demikian perlu disadari bahwa buku-buku hasil penerbitan Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara ini baru merupakan langkah awal. Kiranya kelemahan dan kekurangannya yang masih terdapat dalam penerbitan ini dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof Dr. Edi Sedyawati
NIP 130 202 902

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN ..	v
DAFTAR ISI	vii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah	6
1.3 Tujuan	8
1.4 Metodologi	9
1.5 Kerangka Penulisan	10
Bab 2 Identifikasi	13
2.1 Lokasi	13
2.2 Penduduk	14
2.3 Mata Pencarian dan Pendidikan	17
2.4 Latar Belakang Masyarakat dan Kebudayaan ..	20
Bab 3 Asal Usul Sukubangsa Gumay, Semidang Dan Pasemah	28
3.1 Cerita-cerita Rakyat Gumay	29
3.2 Cerita-cerita Rakyat Semidang	32
3.3 Cerita-cerita Rakyat Pasemah	36

Bab 4 Kepemimpinan Tradisional	38
4.1 Sumbay atau Jurai	38
4.2 Marga	42
4.3 Pemangku Adat	55
4.4 Pemimpin Agama	56
Bab 5 Peranan Pemimpin Tradisional Masa Sekarang	57
5.1 Posisi Jurai Tua	57
5.2 Posisi Mantan Pasirah	61
5.3 Posisi Pemangku Adat	63
5.4 Posisi Pemimpin Agama	66
Bab 6 Kesimpulan Dan Saran	67
Bibliografi	74
Lampiran-Lampiran	76
Daftar Tabel	89
Peta	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah mampu untuk hidup seorang diri. Di mana atau dalam keadaan apapun manusia cenderung untuk hidup berkelompok. Pengelompokan sosial itu antara lain dilandasi oleh adanya persamaan kepentingan antara sesama anggota kelompoknya. Untuk mewujudkan kepentingan bersama itu manusia mengorganisir dirinya ke dalam dengan menciptakan peringkat pengaturan dan pengendalian sosial yang sesuai dengan lingkungan dimana mereka hidup dan bergaul bersama. Dalam pengaturan dan pengendalian sosial tersebut diperlukan suatu sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat, dengan kata lain setiap komunitas, masyarakat atau organisasi sosial lainnya mengenal adanya sistem kepemimpinan (*leadership, chieftdom*).

Menurut Encyclopedia of Antropology (1976 : 244), kepemimpinan bukan hanya berkenaan dengan kualitas kepribadian atau kharisma seorang pemimpin, tetapi lebih ditekankan pada pelaksanaan peranan dalam suatu konteks sosial. Jadi kepemimpinan adalah suatu proses interaksi antara pemimpin dengan anggota-anggota lain dalam kelompoknya.

Dalam struktur sosialnya seorang pemimpin umumnya menduduki suatu posisi yang menjadi titik penentu (*focal point*) pembuatan keputusan. Karena itu kepemimpinan mestilah dilihat dalam konteks kelompok atau tindakan kolektif. Para pemimpin dalam suatu situasi mungkin saja tidak lagi memimpin dalam situasi yang lain.

Sementara itu kepemimpinan tidak bisa dari kekuasaan, bahkan keduanya dianggap bagaikan dua sisi dari satu koin, keduanya sama-sama memberi arti satu sama lain. Untuk melihat dimana posisi pemimpin tradisional dalam kehidupan masyarakat sekarang baiknya kita ikuti pembedaan kekuasaan seorang pemimpin menurut Max Weber (1947 : 328). Menurut Kartidirdjo, Weber membedakan antara (1) *kekuasaan tradisional* yang tuntutan keabsahannya didasarkan atas "suatu kepercayaan yang telah ada (*established*) pada kesucian tradisi yang amat kuno", (2) kekuasaan yang rasional atau berdasarkan kepada hukum (*legal*) yang didasarkan atas kepercayaan terhadap peraturan-peraturan dan hak bagi mereka yang memegang kedudukan, yang berkuasa berdasarkan peraturan-peraturan untuk mengeluarkan perintah-perintah, dan (3) kekuasaan kharismatik atau pribadi, yang didapatkan dari pengabdian diri terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu atau sifat yang patut dicontoh dari seseorang, dan dari corak-corak tata-tertib yang diperlihatkan olehnya (Kartodirdjo, 1984 :166).

Berdasarkan jenis-jenis kekuasaan yang ideal menurut Max weber di atas nyatalah bahwa konsep kita tentang pemimpin tradisional mestilah cocok dengan ciri-ciri kekuasaan tradisional yang dimilikinya. Sehingga dapat pula kita bandingkan dengan kekuasaan rasional yang dimiliki oleh umumnya pemimpin yang pada masa sekarang sering disebut-sebut sebagai kepemimpinan formal, yaitu pemimpin resmi yang ditentukan menurut hukum yang berlaku. Akan halnya jenis kekuasaan ketiga, yaitu kharismatik atau keperibadian dalam konteks kehidupan masyarakat setempat, menurut penulis, mestilah diletakkan sebagai corak yang bisa saja dimiliki baik oleh pemimpin tradisional maupun pemimpin rasional (formal).

Indonesia terdiri dari berbagai macam masyarakat dengan kebudayaan masing-masing. Masyarakat-masyarakat setempat dengan kebudayaan-kebudayaan asli mereka sendiri-sendiri itu di Indonesia lebih dikenal sebagai suku bangsa, artinya paroh atau bagian dari bangsa Indonesia. Setiap suku bangsa di daerah-daerah memiliki sistem kepemimpinan tradisional sendiri yang coraknya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan latar belakang sejarah mereka. Dalam mengatur masalah tanah misalnya, suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan peladangan berpindah di Sumatera akan berbeda dengan suku-suku bangsa mayoritas di Pulau Jawa yang sudah sejak lama mengenal sistem pertanian secara menetap. Dalam perjalanan sejarahnya juga, suku-suku bangsa di Indonesia mempunyai pengalaman-pengalamannya sendiri. Pengaruh kebudayaan asing sebagai akibat terselenggaranya hubungan perdagangan, peperangan, dan penjajahan ikut mewarnai corak kebudayaan suku-suku bangsa termasuk di dalamnya sistem kepemimpinannya.

Berbagai bentuk kepemimpinan tradisional yang pernah tumbuh dan berkembang di berbagai suku bangsa di Indonesia. Ciri-cirinya memang tidak jauh dari pembagian sistem kekuasaan seperti yang dikemukakan Max Weber, yaitu bahwa para pemimpinnya memiliki kekuasaan karena mewarisinya berkat adanya suatu keyakinan yang dimantapkan oleh kesucian tradisi yang diterima dan dijalankan oleh warganya. Salah satu aspek tradisi pewarisan kekuasaan tersebut adalah "keturunan" dalam arti adanya hubungan darah baik secara *affinal* maupun *consanguinal*. Menurut tradisi ini hanya seorang yang memiliki hubungan darah atau keturunan langsung dari pemimpin terdahulu yang berhak menerima kekuasaan sebagai pemimpin golongannya. Tradisi kepemimpinan tradisional yang berlandaskan hubungan "keturunan" dengan cikal bakal ini terkait erat dengan sistem kekerabatan yang dimantapkan dalam kehidupan sosial mereka. Akan tetapi karena para pemimpin umumnya adalah kaum laki-laki, maka dalam masyarakat manapun haruslah garis kekerabatan unilineal yang berhak menerima hak kekuasaan tersebut. Dalam masyarakat matrilineal seperti

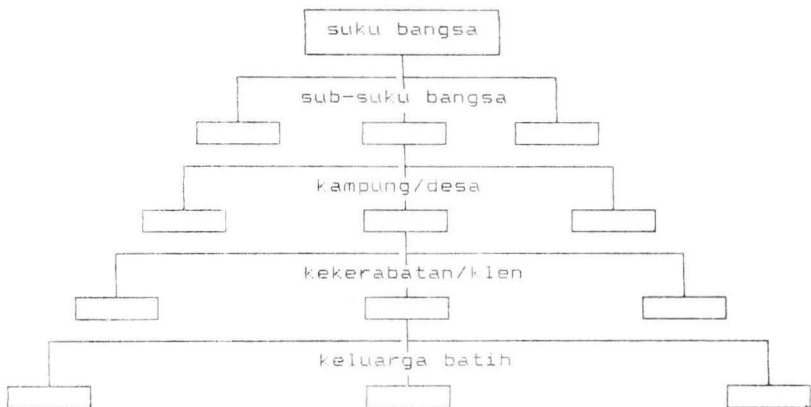
Minangkabau hak seseorang menjadi penghulu, yaitu pemimpin suku (klen) diperolehnya dari garis hubungan darah pada pihak ibu, ia mewarisi kedudukan tersebut dari saudara laki-laki ibunya atau dari saudara laki-laki nenek perempuannya. Ada pula masyarakat Melayu yang berpegang kepada hubungan kekerabatan bilateral dalam kehidupan sosial sehari-harinya. Akan tetapi khusus untuk kekuasaan menjadi penghulu, pemimpin konfederasi klen sistem yang dipakai adalah matrilineal. Kasus terakhir ini ditemukan dalam masyarakat Talang Mamak, salah satu kelompok melayu yang masih memeluk sistem keyakinan aslinya di pedalaman Propinsi Riau.

Lain daerah, lain pula adat istiadatnya : tidak ada suku bangsa yang sama secara detil. Suku-suku bangsa kecil yang mendiami daerah Lahat masing-masing terbentuk oleh penyatuan sejumlah kelompok-kelompok, mulai dari rumah tangga dan ikatan keluarga terus sampai kepada kesatuan suku bangsa secara keseluruhan. Jadi seperti pendapat M.T. Sahlins kelompok-kelompok sosial terkecil seperti keluarga batih dikombinasikan dengan kelompok yang lebih besar melalui beberapa tingkat penyatuan sosial, yaitu : keluarga batih tergabung ke dalam kelompok keluarga luas terbatas atas kekerabatan (*lineage*), tergabung lagi ke dalam kekerabatan satu nenek moyang (*village lineage*) yang biasanya mendiami sebuah desa, desa-desa membentuk konfederasi setempat, selanjutnya konfederasi desa-desa menyatukan diri ke dalam suatu identitas kesukubangsaan. Biasanya suku-suku bangsa dibedakan orang satu sama lain oleh bahasa dan adat istiadat tertentu (Sahlins, 1968 : 14-15).

Susunan tingkat-tingkat pengelompokan sosial dalam suatu suku bangsa dalam skemanya terlihat membentuk suatu piramida, secara teknis sebagai suatu "hirarki bergugus" (*segmentary hierarchy*). Menurut Sahlins unit terkecil seperti keluarga batih adalah gugus-gugus sosial dari unit-unit yang lebih inklusif (terikat ke dalam) yaitu kekerabatan, selanjutnya kelompok-kelompok kekerabatan membentuk lagi gugus yang lebih besar, dan seterusnya, sehingga membentuk suatu bangunan

piramida (lihat Bagan 1.1.). dari sudut lain suku bangsa terbagi lagi ke dalam lingkaran-lingkaran kerabat dekat dan kerabat jauh secara konsentris (bertindihan) : di mana keluarga batih berada pada posisi pusat, lalu suatu lingkaran kekerabatan mengelilinginya, ini dikelilingi lagi oleh lingkaran komunitas desa yang merupakan unsur di dalam lingkaran gugus sub-suku bangsa sampai ke lingkaran gugus suku bangsanya sendiri (lihat Bagan 1.2.). Setiap posisi lingkaran merupakan suatu tingkatan organisasi sosial, dalam perspektif studi ilmu sosial dipandang sebagai sektor hubungan-hubungan sosial. Hubungan-hubungan sosial tersebut meluas dan berkembang begitu individu bergerak keluar dari batasan lingkup keluarganya (Sahlins, 1968 : 15–16).

Bagan 1.1.
Piramida Gugus-gugus Sosial Suku Bangsa



Bagan 1.2.
Lingkaran Konsentris Gugus-gugus Suku Bangsa

Suku
bangsa

sub-suku
bangsa

desa

klen

keluarga
batih

Sistem kepemimpinan asli dalam masyarakat kesukubangsaan yang bergugus-gugus ini dicirikan oleh rezim politik setempat yang terorganisasi di bawah kekuatan ketua-ketua dan golongan keturunan nenek moyang yang dihormati (*primitive nobilities*). Tokoh pemimpin biasanya berasal dari suatu kelompok keluarga luas terbatas (klen) tertentu (Sahlins, 1968: 16).

1.2 Masalah

Berdasarkan konsep-konsep ideal kepemimpinan tradisional seperti pandangan teoritis di atas, maka masalahnya antara lain bagaimana hasilnya jika kita terapkan kepada masyarakat asli di Lahat yang sepintas kelihatan merupakan kelompok suku bangsa yang sama, tapi dalam kenyataannya mereka mengaku satu sama lain berada. Lalu dimanakah letak peranan pemimpin tradisional daerah Lahat ini menurut perkembangan sejarah dan kebudayaan mereka? Bagaimana strategi-strategi penyesuaian diri para pemimpin tradisional itu terhadap perubahan-perubahan sistem politik pada tingkat yang lebih besar? Dalam sejarah perkembangan kebudayaannya masyarakat di daerah ini memang pernah mengalami pengaruh beberapa kekuasaan luar yang lebih besar dan kompleks, antara lain kesultanan Palembang.

bang Darussalam, Pemerintahan Hindia Belanda, Pemerintahan Pendudukan Jepang, kemudian menjadi bagian dari negara Republik Indonesia.

Dalam kasus kepemimpinan tradisional ingkungan masyarakat tradisional atau masyarakat asli di Kabupaten Lahat, keluarga batih sebagai organisasi sosial paling-paling dasar bersifat patrilineal, walaupun pola menetap setelah kawin bisa bersifat ukorilokal. Keluarga-keluarga batih yang berasal dari satu keluarga asal membentuk suatu kelompok keluarga luas terbatas (klen kecil) yang bersifat patrilineal secara teritorial dan genalogis yang disebut *suku*. Maksudnya kesatuan hidup suku ini biasanya berdiam mengelompok di lingkungan wilayah pihak lelaki. Kesatuan sosial yang lebih penting lagi adalah kesatuan sejumlah suku yang menganggap diri mereka berasal dari satu *puyang* (leluhur atau moyang) yang pertama sekali mendiami tempat itu, kesatuan sosial seperti ini disebut *jurai* atau lebih dikenal sebagai *sumbay*. Sumbay-sumbay yang berasal dari rombongan puyang yang datang ke daerah itu dalam kelompok dan gelombang yang sama merasa memiliki identitas diri yang sama pula. Pada masa lalu dicirikan oleh kesatuan adat istiadat yang menjadi dasar bagi ikatan konfederasi sumbay sehingga mereka menganggap diri sebagai "orang" yang sama. Pengakuan diri sebagai "orang" tertentu ini entah sebagai Orang Gumay, Orang Semidang atau Orang Basemah menurut kategorisasi kesukubangsaan di atas kita masukkan ke dalam kategori sub-suku bangsa. Namun bagaimanapun asumsi ini harus kita uji dengan menganalisa kehidupan sosial politik masyarakat asli di Lahat dalam bab-bab berikut.

Sementara itu mungkin dapat kita kemukakan suatu hipotesa umum mengenai kepemimpinan tradisional daerah Lahat, bahwa kepemimpinan tradisional masyarakat asli setempat dapat bertahan selama tuntutan keabsahannya yang didasarkan atas "suatu kepercayaan yang telah ada (*established*) pada kesucian tradisi yang amat kuno" masih didukung oleh lingkungan sosial yang melahirkan dan tempat di mana selama ini sistem itu bertahan. Secara khusus tulisan ini berkeinginan untuk me-

ngemukakan tesa baru bahwa kepemimpinan tradisional mengalami perubahan sesuai dengan perubahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat pendukungnya.

1.3 Tujuan

Penelitian instansional yang dilaksanakan oleh para staf Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jendral Kebudayaan ini antara lain bertujuan mengisi ruang kosong mengenai informasi di bidang sosial budaya, khususnya aspek kepemimpinan tradisional daerah-daerah yang masih tersisa sampai kepada masa sekarang. Fokus perhatian terutama diarahkan kepada informasi mengenai bagaimana peranan dan pengaruh dari sisa-sisa sistem kepemimpinan tradisional setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1975 tentang pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Walaupun Peraturan Pemerintah tersebut telah berlaku hampir dua puluh tahun, akan tetapi pengaruh dan hambatan dari sistem pemerintahan tradisional terhadap pembangunan di daerah-daerah masih terasa seperti dilaporkan oleh banyak pelaksana pembangunan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dalam kapasitas tugas dan fungsinya berusaha mengangkat kasus sistem kepemimpinan tradisional di daerah Lahat melalui program penelitian di bawah proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, untuk tahun anggaran 1992–1993 ini.

Kami mengharapkan dengan adanya laporan pendahuluan ini, gambaran umum tentang hasil kegiatan penelitian lapangan yang dilaksanakan dari bulan Oktober – November 1992 yang lalu dapat menjadi pegangan bagi yang berkepentingan dengan proyek penelitian ini. Diharapkan laporan akhir berupa naskah final deskripsi mengenai Sistem Kepemimpinan Tradisional Daerah Lahat, Sumatera Selatan ini dapat memberikan informasi tambahan bagi mereka yang ingin mengetahui masyarakat dan budaya daerah Lahat, terutama dalam hal kepemimpinan tradisional, selain mungkin akan merangsang minat para ahli lain untuk meneliti lebih lanjut daerah ini. Hal ini sangat diharapkan sekali terutama oleh Bupati Daerah Tingkat II Lahat,

Bapak Drs. H. Kafrawi Rahim, agar masyarakat dan kebudayaan di daerah Lahat lebih dikenal oleh masyarakat di daerah lainnya di Indonesia.

1.4 Metodologi

Tulisan ini pada dasarnya diolah dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh dua anggota tim peneliti dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional ke daerah tingkat dua Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pada tanggal 12 Oktober sampai dengan 12 November 1992 yang lalu. Penelitian lapangan itu sendiri berlandaskan kepada TOR (*term of references*) dan dukungan hasil studi kepustakaan mengenai masalah kepemimpinan tradisional secara konsepsional, dan secara regional menyangkut kepemimpinan tradisional di daerah Sumatera Selatan umumnya.

Jadi metodologi yang dijalankan sesuai dengan prosedur penelitian ilmu-ilmu sosial budaya dan politik lainnya tidak mengabaikan studi kepustakaan, mengingat daerah Sumatera Selatan bukanlah daerah yang sama sekali belum disentuh oleh perhatian para penulis. Tahap pengecekan kepada buku-buku rujukan tersebut amat membantu pengkategorisasian data serta pefokuskan perhatian kepada pengumpulan data bagi pemecahan masalah yang ingin dibuktikan. Penelitian lapangan dimulai dengan penjajagan ke lingkungan pranata sosial politik formal, yaitu ke Kantor Bupati dan instansi-instansi kantor wilayah yang berkaitan seperti Dinas Dikbud dan jajarannya sampai ke tingkat kecamatan. Selanjutnya diikuti oleh pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang diakui oleh pemimpin formal sebagai orang-orang yang mengenal dan mengetahui banyak hal mengenai daerah dan masyarakat Lahat. Setahap demi setahap, akhirnya sampai kepada tokoh-tokoh pemimpin formal yang masih diakui oleh masyarakatnya.

Melalui teknik probing dan wawancara mendalam serta pelacakan sumber informasi sampai ke pelosok-pelosok desa terkumpullah bahan-bahan untuk melengkapi tulisan ini. Melalui pendekatan yang bersifat pengembangan perhatian secara kon-

tekstual (*contextual progressive*) diperoleh kaitan variabel kepemimpinan dengan aspek-aspek lain seperti kekerabatan, ekonomi, religi, mitologi, arkeologi, hubungan antar suku bangsa, politik praktis dan sebagainya. Semuanya itu disortir dan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dihasilkan laporan seperti sekarang.

Untuk mendukung metodologi di atas tim sengaja memanfaatkan peralatan rekaman elektronik serta catatan lapangan. Fakta-fakta tertentu yang dapat didokumentasikan secara visual direkam dengan kamera foto. Sedangkan yang dapat didokumentasikan secara audio direkam dengan *tape recorder*. Selain mencatat secara langsung informasi yang ada dengan tulisan tangan, tim juga memanfaatkan bahan tertulis dengan mengkopinya. Sebagian dari bahan rekaman tersebut sempat dialihaksarakan, seperti terlampir di bagian akhir laporan ini.

1.5 Kerangka Penulisan

Laporan ini bersifat deskriptif, karena itu uraian dihidangkan dalam bentuk urutan bab-bab penjelasan secara umum kepada khusus, sampai diperoleh suatu kesimpulan. Karena itu pembagian bab dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan, yaitu bagian yang menjelaskan segala hal mengenai penelitian dan penulisan laporan ini sendiri, antara lain mengenai latar belakang masalah yang diupas secara teoritis, dilanjutkan dengan rumusan mengenai masalah, tujuan serta hipotesa yang ingin diungkapkan. Selanjutnya dijelaskan pula metodologi yang diterapkan dalam lingkup penelitian ini, baik metodologi bagi kajian kepustakaan, maupun pendekatan serta teknik-teknik yang diterapkan dalam penelitian di lapangan dalam rangka menjaring informasi dan data sebanyak mungkin.

Bab II, Identifikasi. Bagian ini khusus menjelaskan keadaan umum lingkungan alam, masyarakat dan kebudayaan di daerah Lahat. Karena itu bab ini dibagi-bagi menjadi beberapa sub-bab, yaitu mengenai lokasi dan keadaan alam Kabupaten Lahat, data mengenai kependudukan dan perkembangannya, mengenai

keadaan matapencaharian dan perkembangan pendidikan, dan sub-bab mengenai latar belakang masyarakat dan kebudayaannya.

Bab III. Cerita Mengenai Asal Usul Sub-Suku Bangsa Gumay, Semidang dan Pasemah. Bagian ini kami ketengahkan, mengingat masyarakat yang terikat dengan kesejarahan dan kebudayaan juga dengan lingkungan setempat ini hanya bisa diduga-duga asal usulnya berdasarkan mitos dan legenda yang berkembang. Selain itu kajian khusus mengenai tradisi lisan ini sangat membantu kita memahami pemikiran dan perkembangan masyarakat asli Lahat. Karena dalam penelitian ini ada tiga sub-suku bangsa yang menjadi pusat perhatian, maka yang diketengahkan juga cerita-cerita yang beredar dalam ketiga masyarakat tersebut. Jadi ada sub-bab yang menceritakan mitos atau legenda sub-suku bangsa Gumay, ada pula yang mengenai sub-suku bangsa Semidang dan Pasemah.

Bab IV. Kepemimpinan Tradisional. Dalam bagian ini baru secara khusus diuraikan bagaimana sebenarnya sistem kepemimpinan tradisional yang pernah ada dan berkembang di lingkungan masyarakat suku-suku bangsa di Kabupaten Lahat. Pertama diuraikan bentuk organisasi sosial tradisional di mana sistem kepemimpinan asli mendapatkan dasar-dasar bagi kekuasaan tradisionalnya, yaitu mengenai kesatuan sosial yang bersifat genealogis dan teritorial yang disebut *jurai* atau *sumbay*. Kemudian mengenai sistem kekuasaan yang lebih rasional dan berasal dari sistem pemerintahan yang lebih kompleks, yaitu *marga* yang dikenal dengan pemimpinnya yang disebut *Pesirah*. Bentuk kepemimpinan kedua ini masih banyak pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan, karena sempat dikembangkan sejak zaman kesultanan Palembang Darussalam, Pemerintah Hindia Belanda, bahkan masih sempat bertahan dalam negara Republik Indonesia selama lebih kurang 30 tahun.

Bab V. Peranan Pemimpin Informal Masa Sekarang. Pertama akan dijelaskan bagaimana sekarang posisi *jurai tua* yaitu para pemimpin *sumbay* yang dapat dianggap sebagai sistem kepemimpinan tradisional paling tua dalam kehidupan masyarakat

asli di kabupaten Lahat. Dasar bagi kepemimpinan paling tua ini pada masa sekarang memang terasa goyah karena kekuatan yang diperolehnya dari keyakinan masyarakat akan mitos kesucian kekuasaan warisan leluhur sudah semakin luntur akibat berbagai perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai posisi tokoh-tokoh bekas *pesirah* yang dulu adalah Kepala Marga yang disegani karena kekuasaannya jauh lebih besar dari pemimpin tradisional lain di lingkungannya. Posisi para bekas *pesirah* ini patut sekali disorot, mengingat pada masa sekarang jumlah mereka masih cukup banyak dan masih memiliki pengaruh tertentu dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam dusunnya. Dalam bab ini dijelaskan pula keberadaan suatu lembaga sosial baru yang direkayasa oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah sosial budaya yang tergolong kepada masalah adat istiadat setempat, yaitu Lembaga Pemangku Adat. Lembaga ini sebenarnya dimaksudkan untuk menggantikan kebutuhan masyarakat akan bimbingan dan binaan dari bekas kepemimpinan tradisional. Sayangnya lembaga ini hanya melibatkan tokoh-tokoh yang menguasai masalah adat istiadat yang bisa tulis baca saja, serta mengabaikan keberadaan sisa pemimpin tradisional yang paling lama dikenal dalam sistem sosial mereka, yaitu para jurai tua, pemimpin kharismatik sumbay.

Bab VI, Kesimpulan. Sebagai bagian akhir yang mencoba menyimpulkan keadaan dan keberadaan sistem-sistem kepemimpinan tradisional yang masih hidup atau yang masih tinggal sisanya, serta bagaimana pengaruh mereka dalam era pembangunan masa sekarang.

BAB II

IDENTIFIKASI

2.1 Lokasi

Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat terletak di Propinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini luasnya kurang lebih 7.251,93 Km² dan terletak antara 3,50⁰ sampai 4,25⁰ Lintang Selatan dan 103,0⁰ sampai 103,70⁰ Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten ini di sebelah utara adalah berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas, di sebelah selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan (Wilayah Propinsi Bengkulu), di sebelah barat dengan Kabupaten Renjang Lebong (Wilayah Propinsi Bengkulu), dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Muara Enim. Dengan demikian kabupaten ini merupakan kabupaten yang terletak di sebelah barat Propinsi Sumatera Selatan yang bagian wilayahnya berbatasan dengan Propinsi Bengkulu.

Untuk mencapai kabupaten ini tidaklah sulit, karena sarana transportasi darat, dilintasi oleh jalan besar trans Sumatera. Selain itu bagi masyarakat yang telah lama menggunakan sarana transportasi sungai masih dapat menggunakannya, terutama sekali di daerah Tebing Tinggi, karena sungai-sungai yang ada di daerah cukup dalam dan lebar untuk dilalui oleh

perahu-perahu bermotor. Selain itu jalan-jalan di dalam wilayah kabupaten inipun dalam kondisi yang baik sehingga dapat dilalui sampai ke desa-desa. Hanya saja pada umumnya jalan-jalan yang ada ditumbuhi alang-alang di kiri dan kanan jalan sehingga cukup mengganggu pengendara, terutama di daerah yang banyak belokan dan apabila berpapasan dengan kendaraan lain dari arah yang berlawanan cukup menyulitkan. Sarana kendaraan umum baik di dalam maupun untuk ke luar kabupaten juga cukup banyak sehingga memudahkan perjalanan antar kecamatan.

Sebagian wilayah kabupaten ini terletak di dataran tinggi atau tepatnya bagian kaki pegunungan Bukit Barisan, dengan puncak tertingginya Gunung Dempo (3.159 meter) dan sebagian wilayahnya berada di lembah Dempo yang subur itu. Kondisi tanahnya secara umum cukup baik untuk pertanian, karena di samping terletak dataran tinggi (wilayah gunung berapi) juga karena banyak sungai yang melintasinya. Di sini terdapat lima buah sungai besar, yaitu Sungai Musi, Lematang, Kikim, Lintang, dan Endikat, kemudian ditambah lagi ada sekitar 343 buah anak sungai.

Pemerintahan daerah tingkat II Kabupaten Lahat secara administratif terbagi atas beberapa kecamatan dan sebuah kota administratif yang membawahi empat buah kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Lahat, Merapi, Kikim, Pangkal Pinang, Kota Agung, Tanjung Sakti, Jarai, Muara Pinang, Pendopo, Tebing Tinggi, dan Ulu Musi. Kemudian ditambah lagi dengan empat buah perwakilan kecamatan, yaitu Pajar Bulan, Muara Danau, Talang Padang, dan Pasemah Air Keruh. Sedangkan kecamatan-kecamatan di bawah Kota Administratif Pagar Alam adalah Pagar Alam Utara, Pagar Alam Selatan, Dempo Utara, dan Dempo Selatan.

2.2 Penduduk

Menurut Data Pokok Kabupaten Lahat tahun 1992 penduduk di daerah kurang lebih berjumlah 611.356 jiwa. Dapat

dikatakan bahwa penduduk di kabupaten ini menyebar relatif merata di seluruh kecamatan, namun kecamatan terbanyak dihuni adalah kecamatan Lahat, yaitu sekitar 86.093 jiwa tinggal di sini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini yang mencakup juga pembagian menurut jenis kelamin dan sex rasionya.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Lahat
Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Pagar Alam Sel.	15.829	17.106	32.934	92,54
Pagar Alam Utara	15.491	15.599	31.090	99,31
Dempo Selatan	11.324	11.393	22.719	99,39
Dempo Utara	11.002	9.191	20.193	199,70
Lahat	42.968	43.125	86.093	99,64
Kikim	25.012	31.175	56.187	80,23
Merapi	16.931	17.333	34.264	97,68
Pulau Pinang	10.731	11.382	22.113	94,28
Kota Agung	15.984	16.643	32.627	96,04
Tanjung Sakti	13.139	11.244	24.383	116,85
Jarai	14.605	14.654	29.259	99,66
Muara Pinang	13.602	14.576	28.178	93,32
Pendopo	20.483	23.124	43.607	88,58
Ulu Musi	17.982	14.341	32.323	125,39
Tebing Tinggi	20.708	22.068	42.776	93,84
Pajar Bulan	9.803	9.945	19.748	98,57
Muara Danau	11.338	12.442	23.780	91,13
P. Air Keruh	8.349	9.300	17.649	89,77
Talang Padang	5.384	6.051	11.935	88,98
J u m l a h	300.665	310.641	611.356	96,77

Sumber : Data Pokok Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lahat, 1992.

Mulai sekitar tahun 1980 kabupaten ini sudah menerima transmigran asal Jawa, yaitu dari wilayah daerah tingkat I Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka itu ditempatkan di beberapa lokasi transmigrasi di beberapa kecamatan, antara lain di Kecamatan Kikim, Lahat, Tebing Tinggi, Merapi, Pulo Pinang, dan Ulu Musi. Sampai dengan tahun 1991 tercatat jumlah keseluruhan transmigran 30.817 jiwa atau terdiri atas 6.860 Kepala Keluarga yang menetap di wilayah Kabupaten Lahat. Penempatan transmigran ini dilakukan secara bertahap oleh Departemen Transmigrasi dan menurut catatan terakhir, yaitu pada tahun 1991, telah ditempatkan pula sebanyak 15 Kepala Keluarga atau 51 jiwa transmigran asal Jawa di kabupaten ini.

Selain catatan perubahan jumlah penduduk karena pemindahan penduduk dalam proyek-proyek transmigrasi, belum tercatat perubahan jumlah penduduk setempat karena mobilitasnya. Mungkin hal ini disebabkan sulitnya kegiatan pencatatan, mengingat mobilitas masyarakat daerah ini cukup tinggi karena mudahnya transportasi. Menurut keterangan penduduk setempat, pada masa sekarang banyak sekali orang Lahat yang tinggal di Palembang atau bahkan di Jakarta. Beberapa orang tua menyekolahkan anak-anaknya, terutama untuk jenjang pendidikan tinggi, seperti di Universitas Sriwijaya, di Palembang, atau universitas-universitas lain di Jakarta. Mungkin hal inilah yang menyebabkan adanya gejala khusus pada piramida jumlah penduduk menurut umur. Skema piramida memperlihatkan bahwa jumlah penduduk berusia lanjut terlihat kecil dan yang besar pada jumlah penduduk berusia muda, sedangkan angka-angka jumlah penduduk yang berusia produktif berada antaranya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambaran kuantitas dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Penduduk Kabupaten Lahat
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	39.327	42.161	81.488
5 – 9	43.236	44.367	87.603
10 – 14	42.574	43.838	86.412
15 – 19	29.019	29.019	58.364
20 – 24	25.045	27.838	52.883
25 – 29	21.948	27.123	49.071
30 – 34	20.084	19.325	39.409
35 – 39	19.303	17.958	37.261
40 – 44	12.417	12.241	24.658
45 – 49	13.109	11.371	24.480
50 – 54	10.584	10.595	21.179
55 – 59	6.765	7.363	14.128
60 – 64	8.569	7.985	16.554
65 – 69	4.751	5.810	10.561
70 >	3.608	3.697	7.305
J u m l a h	300.665	310.691	611.356

Sumber : Data Pokok Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, 1992.

2.3 Mata Pencanharian dan Pendidikan

Pada umumnya mata pencaharian penduduk di Kabupaten Lahat ini adalah bertani, baik bertani di ladang maupun di sawah, dan juga berkebun. Sedangkan jenis tanaman yang ditanam beragam sekali, mulai dari tanaman bahan makanan pokok seperti padi, lalu buah-buahan seperti durian, duku,

rambutan, kelapa, dan selanjutnya sayur-sayuran. Di samping itu hasil perkebunan tanaman untuk ekspor dan yang laku di pasaran juga nampak menonjol, *seperti* kopi, karet, tembakau, kelapa, lada, teh, dan sebagainya. Daerah Lahat memang terkenal sebagai penghasil kopi dan teh di Sumatera Selatan. Di daerah ini terdapat beberapa perkebunan besar tanaman teh, kopi dan karet. Dengan demikian mata pencaharian masyarakat di daerah selain bertani dan berladang di lahan-lahan milik sendiri, ada juga yang bekerja menjadi buruh di perkebunan, seperti di perkebunan kopi, karet atau teh. Kebanyakan mereka yang menjadi buruh di perkebunan ini adalah orang-orang yang berasal dari Pulau Jawa. Penduduk setempat sendiri nampaknya sangat jarang yang menjadi buruh di perkebunan teh atau karet.

Jenis mata pencaharian lainnya cukup banyak juga, namun tidak begitu menonjol. Misalnya saja peternakan ayam ras, perikanan, dan lain sebagainya. Nampaknya di daerah ini memang belum begitu populer usaha menjadikan peternakan ataupun perikanan sebagai mata pencaharian utama. Memelihara ternak sebenarnya bagi mereka hanya merupakan pekerjaan sampingan saja di mana hasilnya dapat diambil sewaktu-waktu kalau diperlukan. Hal ini terlihat dari cara penduduk asli memelihara ternak, karena ternak-ternak itu dilepas begitu saja, dibiarkan berkeliaran bebas di mana-mana untuk mencari makan sendiri dan pulang ke rumah tuannya hanya sewaktu-waktu saja. Demikian bebasnya hewan ternak tersebut, sehingga kadangkala sangat mengganggu kelancaran lalu lintas di jalanan, terutama untuk Jalan Trans Sumatera yang terhitung sangat ramai itu. Menurut keterangan penduduk setempat, setiap hewan ternak tersebut, terutama sapi dan kerbau, diberi tanda di telinganya sehingga mudah diketahui siapa pemiliknya.

Tabel 3
Angkatan Kerja di Kabupaten Lahat Tahun 1991

Jenis	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usia Kerja	251.167	248.371	499.538
Angkatan Kerja	130.120	128.671	258.791
Bukan Angkatan Kerja	116.019	114.728	230.747
Tidak Bekerja	1.782	1.764	3.546
Lain-lain	3.245	3.209	6.454
Jumlah	502.333	496.743	999.087

Sumber : Data Pokok Kab. Daerah Tk. II Lahat, 1992.

Walaupun nampaknya banyak pekerjaan yang dapat diisi di sekitar pertanian, namun angka-angka pengangguran di kabupaten Lahat ini tak urung muncul juga. Hal ini mungkin karena pembangunan di sekitar pendidikan telah meningkat dengan pesat, sehingga makin banyak para lulusan ingin menggunakan keahlian yang mereka peroleh dari sekolah untuk bekerja di luar sektor pertanian. Sampai dengan tahun 1991 saja tercatat sebanyak 181 orang penganggur tamatan Sekolah Dasar, 127 orang tamatan Sekolah Menengah Pertama, 2.127 orang tamatan Sekolah Menengah Atas, 22 orang telah mencapai tingkat Sarjana Muda, dan 75 orang tamatan Perguruan Tinggi atau Sarjana. Menurut penuturan beberapa orang penduduk, mereka yang telah mengenyam pendidikan itu pada umumnya ingin bekerja di pemerintahan sebagai pegawai negeri. Namun bagaimanapun juga daya serap tenaga kerja yang ada pada instansi-instansi pemerintah ini sama sekali tidak seimbang dengan jumlah orang yang telah lulus dari berbagai tahap pendidikan yang tiap tahun terus meningkat. Sektor swasta di daerah ini nampaknya juga belum dapat diandalkan untuk menyerap tenaga kerja sedemikian banyak. Sampai dengan tahun 1991 tercatat hanya ada 185 buah perusahaan di lingkungan kabupaten Lahat, di mana hanya 24 buah diantaranya yang mampu menyerap

10 orang pekerja ke atas, sedangkan sisanya hanya dapat menyerap 10 orang pekerja ke bawah.

Kalau dilihat dari sarana pendidikan yang ada di kabupaten ini, memang telah banyak sekolah yang didirikan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hampir di setiap kecamatan telah ada sekolah dasar. Sampai tahun 1991 tercatat 1.060 buah Sekolah Dasar, 95 Sekolah Menengah Pertama, dan 38 buah Sekolah Menengah Atas. Selain sarana pendidikan sekolah ada juga telah ada pendidikan ketrampilan yang dikelola oleh swasta, seperti kursus-kursus bahasa asing, mengetik dan komputer, pendidikan ketrampilan menjahit, montir mesin mobil, sepea motor, radio dan sebagainya.

2.4. Latar Belakang Masyarakat dan Kebudayaan.

Menurut pengakuan mereka, penduduk setempat atau penduduk asli di wilayah kabupaten Lahat ini secara garis besar terdiri dari beberapa suku bangsa, yaitu Pegangan, Rambang, Semendawai, Semendo, Bermani, Gumay, Semidang, dan Pasemah. Ketiga suku bangsa terakhir seringkali dikelompokkan orang menjadi satu suku bangsa, yaitu Pasemah atau Basemah. Dilihat dari segi budaya atau adat istiadatnya, suku bangsa Gumay, Semidang dan Pasemah memang memiliki banyak kesamaan, namun kalau kita bertanya kepada mereka, mereka menyatakan bahwa berbeda satu dengan lainnya. Ciri-ciri persamaan dan perbedaan antara ketiganya cenderung menunjukkan bahwa ketiganya dapat kita kategorikan sebagai tiga sub-sub bangsa dari satu suku bangsa, yaitu Pasemah.

Penamaan suku bangsa Pasemah bagi ketiga sub-suku bangsa ini tidak pula mudah, karena secara sadar mereka menganggap masing-masing berada dalam batas kelompok sendiri-sendiri. Maksudnya anggota-anggota suku-suku bangsa yang satu tidak termasuk dan tidak terikat oleh hukum adat atau ketentuan sosial politik sub-suku bangsa yang lain. Sungguhpun ke luar mereka sering mengaku sama-sama satu asal leluhur, akan tetapi ke dalam mereka satu sama lain merasa berbeda kelom-

pok. Menurut urutan kedatangan leluhur mereka di daerah Lahat itu orang Pasemah dianggap sebagai golongan yang ‘fermudá’. Kelompok yang dianggap ‘tértuá’ adalah sub-suku bangsa Gumay, dan Semidang yang di ‘fengalt’ (Untuk jelasnya lihat Bab III : Cerita Mengenai Asal Mula Sub-suku Bangsa Gumay, Semidang, dan Pasemah).

Sebaliknya orang luar lebih banyak mengenal nama suku bangsa Pasemah, antara lain berkat tari-tariannya. Sementara itu kebudayaan atau adat istiadat mereka secara umum boleh dikatakan sama, seperti kita temukan dalam uraian mengenai kehidupan sosial budaya mereka di bawah ini. Bahasa mereka boleh dikatakan sama, yaitu suatu bahasa yang tergolong ke dalam rumpun bahasa Melayu Sumatera Selatan umumnya, hanya saja dialek mereka diwarnai oleh corak pemakaian vokal e pada kosa kata yang cenderung diberi vokal o oleh suku bangsa Palembang atau orang-orang di daerah Ogan Komering Ilir lain. Ketiga suku bangsa ini memang cukup menonjol dalam kehidupan sosial budaya daerah Lahat khususnya, terlihat dari besarnya peranan mereka dalam aspek sosial politik setempat. Banyak di antara para pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat yang berasal dari ketiga suku bangsa ini.

Sementara itu dari banyak bukti temuan arkeologis diketahui bahwa sebelum kedatangan nenek moyang masyarakat tradisional setempat di lembah Dempo sudah ada kelompok masyarakat dengan kebudayaan yang lebih tua lagi. Hal ini dibuktikan oleh adanya peninggalan-peninggalan kebudayaan megalit yang khas. Ciri-ciri kebudayaan orang Gumay, Semidang dan Pasemah sekarang sama sekali tidak memperlihatkan kaitan apa-apa dengan peninggalan-peninggalan kebudayaan megalit tersebut. Legenda yang mereka kaitkan dengan peradaban batu tersebut amat sedikit dan walaupun ada amat kabur hubungannya. Kebanyakan megalit-megalit tersebut ditemukan mulanya oleh orang-orang Belanda. Masyarakat setempat sendiri baru tahu kalau di bawah lapisan tanah ladang, sawah atau kebun mereka terdapat banyak artefak kuno yang mencengangkan. Jadi boleh disimpulkan bahwa sewaktu nenek moyang suku-

suku bangsa di atas datang ke wilayah Lembah Dempo di sana pernah hidup dan berkembang suatu masyarakat dengan kebudayaan magalit. Hanya saja masyarakat-masyarakat berkebudayaan megalit tersebut telah punah entah oleh letusan gunung Dempo atau akibat bencana alam lainnya. Boleh dikatakan sewaktu nenek moyang suku bangsa Gumay, Semidang dan Pasemah datang dengan kebudayaan pertanian irigasi, mereka membuka lahan di atas kebudayaan megalit yang telah tertimbun selama ratusan tahun.

Walaupun demikian, dari berbagai legenda yang ada dalam ketiga suku bangsa tersebut itu dinyatakan bahwa perbedaan yang ada terutama berkenaan dengan asal usul nenek moyang mereka. Antara lain bahwa leluhur yang menurunkan mereka datang tidak secara bersamaan, sungguhpun mungkin masih berasal dari satu kelompok asal yang sama. Semua legenda mereka bercerita tentang awal mula kedatangan leluhur mereka yang masuk ke pedalaman Sumatera ini dengan menyusuri Sungai Musi ke arah hulunya. Patut diketahui bahwa masyarakat setempat di daerah ini lebih kenal dengan nama Sungai Lematang dari pada Sungai Musi. Sungai Lematang adalah salah satu sungai besar dari pegunungan Bukit Barisan yang mengalirkan airnya ke Sungai Musi. Mungkin sekali nenek moyang penduduk asli Lahat ini datang pada zaman awal berdirinya kerajaan Sriwijaya.

Pada leluhur yang dianggap sebagai cikal bakal kelompok mereka disebut dengan istilah yang sama yaitu puyang. Sedangkan cara-cara orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota kelompok keturunan dari puyang tertentu disebut *kepuyangan*. Karena lokasi pemukiman mereka berada pada mulanya, maka mereka masing-masing membentuk kesatuan keluarga luas satu keturunan (klen) di lokasi tertentu. Keluarga besar seketurunan itu disebut *sumbay* atau *jurai*. Zaman, dahulu ketika populasi masyarakat ini masih kecil perkawinan dengan orang satu sumbay atau satu *jurai* adalah hal yang terlarang. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran perkawinan itu, yaitu menikah dengan orang yang berasal dari

sesama satu sumbay akan dibuang keluar wilayah kekuasaan sumbay. Namun sekarang keadaan telah berubah di mana populasi masing-masing sumbay semakin besar dan mereka menyebar di berbagai daerah dan juga karena jumlah pelanggar semakin besar saja, sehingga disepakatilah untuk memperbolehkan perkawinan dengan orang *sesumbay* namun harus mengikuti aturan mengenai batas-batas siapa yang boleh dikawini dan siapa yang tidak boleh dikawini menurut hubungan darah dan dengan memperhitungkan pula ketentuan agama Islam yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat asli di daerah Lahat ini.

Bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku di daerah tersebut antara lain *tambe anak*, *belaki*, dan *jurai sesame*. *Tambe anak* adalah bentuk perkawinan di mana pihak wanita memberikan uang jujur (maskawin) kepada pihak laki-laki sehingga nampak seakan-akan mempelai lelaki dibeli oleh pihak wanita. Secara halus dikatakan bahwa lelaki itu sekarang telah “diambil anak” oleh pihak perempuan, dan dalam kehidupan sehari-hari pasangan ini tinggal di lingkungan keluarga asal si istri (uksorilokal). Dalam bentuk perkawinan seperti ini, hak dan kewajiban sang lelaki dalam keluarganya menjadi hilang, termasuk dalam hal harta warisan.

Belaki adalah bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan uang jujur (maskawin) kepada pihak wanita. Ini merupakan kebalikannya dari *tambe anak*, sehingga hak dan kewajiban si wanita menjadi hilang dalam keluarganya, sementara itu setelah kawin si wanita biasanya dibawa oleh suaminya tinggal di lingkungan keluarga asal pihak lelaki. Sedangkan dalam bentuk perkawinan *jurai sesame* tidak diperlukan uang jujur, sehingga hak dan kewajiban masing-masing, yaitu sang lelaki dan wanita, dalam lingkungan keluarganya masih tetap ada. Hubungan kekerabatan yang terbentuk akibat bentuk perkawinan ketiga ini akan bersifat bilateral, karena masing-masing pihak mereka hak dan kewajiban sosial mereka sama. Karena itu sering diungkapkan, bahwa bentuk perkawinan jurai sesama ini kebanyakan ditemukan di kalangan sesama golongan penting dalam masyarakat.

Sumbay-sumbay pada mulanya mempunyai wilayah tertentu yang dikuasai dan dipimpin oleh seorang pimpinan yang dinamakan *jurai tua* atau *jurai tuwe*. Seorang jurai tua memimpin sumbaynya karena dia dianggap sebagai keturunan langsung dari nenek moyang cikal bakal pendiri sumbay, yaitu tokoh-tokoh yang biasanya disebut *puyang* atau *pyang*. Dengan demikian jabatan jurai tua ini mestilah dijabat secara turun temurun, selama beberapa generasi sampai sekarang. Biasanya jabatan jurai tua ini diturunkan pada anak laki-laki pertama, tetapi dalam kasus-kasus tertentu di mana si anak pertama tidak dapat menjabat atau anak pertama itu seorang anak perempuan, bisa saja jabatan itu jatuh ke tangan anak ke dua dan seterusnya atau pada menantu. Oleh karena itu untuk mengetahui siapa yang menjabat jurai tua salah satunya dapat dilihat dari kepemilikan harta pusaka yang melambangkan bahwa dialah yang menjabat jurai tua yang sah. setiap jurai tua biasanya membawahi beberapa kampung atau dusun yang dipimpin oleh para *sungut dusun*.

Walaupun menurut legenda ketiga suku bangsa itu berasal dari satu keturunan, namun sudah sangat sulit untuk menelusuri nama-nama puyang mereka itu sampai ke titik awalnya. Masing-masing suku bangsa tersebut biasanya hanya dapat menyebutkan sebagian saja nama-nama puyangnya, yaitu hanya beberapa generasi di atasnya berikut dengan perkiraan mengenai lokasi tempat bermukimnya mereka mula-mula datang. Misalnya saja suku bangsa Gumay sekarang tidak hanya bermukim di tempat asalnya yang diduga di Lahat, tetapi telah menyebar sampai ke beberapa daerah lain di Sumatra Bagian Selatan, yaitu ada pula yang menetap dan berkembang baik di propinsi Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Demikian pula halnya dengan persebaran orang-orang yang berasal dari suku bangsa Semidang dan Pasemah (lihat lampiran).

Sementara itu memang ada usaha dari beberapa pihak untuk menginventarisasi dan menyusun kembali silsilah kepunyaan tiap-tiap sumbay atau jurai, namun nampaknya masih dalam tahap pendahuluan. Selain itu mereka akui bahwa usaha mene-

lusuri masa lalu leluhur mereka merupakan pekerjaan yang cukup sulit karena para jurai tua dan tokoh-tokoh tua lain menjadi sumber informasi utama sudah amat sedikit, karena sudah banyak yang mati. Selain itu para penulis ini adalah amatiran yang sama sekali tidak memiliki dasar ilmu pengetahuan sejarah yang memadai. Tulisan-tulisan ‘Kesejarahat’ yang mereka buat amat naif dan cenderung subyektif dengan menempatkan golongannya di atas segalanya. Sementara itu tokoh-tokoh sumber informasi yang masih hidup juga hanya ingat sebagian-sebagian saja. Sungguhpun di daerah ini pernah berkembang semacam aksara kuno yang disebut surat ulu, yang diduga masih satu kelompok dengan aksara Rencong, Lampung, Bengkulu, dan batak, akan tetapi para penulis sejarah amatiran tersebut tidak satupun yang bisa membaca tulisan beraksara kuno tersebut.

Pola perkampungan pada zaman dahulu biasanya mengikuti alur sungai, karena kegiatan transportasi masyarakat pada waktu itu banyak tergantung dari sungai. Rumah-rumah dalam satu dusun biasanya berjajar mengikuti alur kiri dan kanan sisi sungai dan cenderung mengelompok menurut keturunan. Pola demikian sampai sekarang masih terlihat sisa-sisanya pada desa-desa penduduk asli. Kecuali desa-desa baru yang kebalikannya cenderung mengelompok dekat jalan raya dan rumah-rumah didirikan di kiri dan kanan sisi jalan.

Bentuk rumah tradisional di daerah ini adalah rumah panggung dengan ketinggian lantai rumah dari atas permukaan tanah sekitar 1,5 – 2 meter. Tiang-tiang penyangga rumah itu terbuat dari balok-balok kayu bulat dengan diameter sekitar 30 x 50 sentimeter. Dalam perkembangannya sekarang ini telah banyak pula penduduk setempat yang mengganti tiang-tiang kayu penyangga rumah mereka dengan campuran beton. Kerangka rumah kayu tersebut biasanya dihiasi dengan ukir-ukiran, begitu pula sebagian dinding beberapa rumah dihiasi dengan ukiran khas berupa bulatan menyerupai matahari. Sayangnya pada sekarang ini gaya arsitektur tradisional yang cukup khas dan menarik itu telah banyak berubah, antara lain dengan me-

ngubah fungsi bagian bawah rumah sebagai ruangan, baik sebagai penyimpanan barang atau sebagai tempat usaha seperti toko atau warung. Menurut tradisi setempat ruangan kosong di bawah rumah tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan kayu api yang sangat diperlukan di kala yang punya rumah mengadakan pesta adat. Di samping itu, diakui pula oleh masyarakat setempat bahwa orang yang mempunyai keahlian mengukir rumah tradisional itu telah langka sekali, karena pada masa sekarang jarang sekali ada orang yang ingin membangun rumahnya dengan hiasan ukiran kuno tersebut.

Atap rumah yang tradisional daerah Lahat biasanya berbentuk agak melengkung menyerupai *rumah gadang* dari daerah Sumatera Barat, namun tidak terlalu lancip, runcing dan tinggi seperti atap rumah gadang tersebut. Di ujung-ujung bubungan atap rumah biasanya dihiasi dengan hiasan yang menyerupai tanduk kerbau. Pada masa sekarang bentuk seperti itu telah banyak berubah, begitu juga dengan bahan baku atapnya. Jika pada zaman dulu bahan utama untuk atap rumah adat itu adalah ijuk yang diperoleh dari pohon enau, maka pada masa sekarang umumnya telah diganti dengan atap seng atau asbes.

Masyarakat daerah Lahat, dan juga daerah Sumatera Bagian Selatan pada umumnya, pernah mempunyai dan mengembangkan aksara kuno yang disebut surat ulu. Tulisan-tulisan dalam tradisi aksara kuno ini kebanyakan memakai tulis berupa ruas-ruas bambu atau dari bahan kulit kayu tertentu yang disebut *kaghas*. Pada masa sekarang sudah sedikit sekali orang yang dapat membaca dan menulis dengan aksara surat ulu, oleh karena itu masyarakat setempat sebenarnya beruntung sekali, karena masih ada beberapa orang yang dapat membaca surat ulu, antara M. Saman Loear, seorang penduduk Pagaram yang bekerja sama dengan Badan Pembina Kebudayaan Daerah (BPKD) Lahat untuk mencetak sebuah buku mengenai cara-cara mempelajari surat ulu. Ternyata untuk mempelajari tulisan ini memang tidak mudah, karena setiap tulisan yang ada pada *kaghas* harus dilihat dulu asal daerahnya. Setiap daerah mem-

punyai versi tulisan yang agak berlainan, dan nampaknya terpengaruh oleh dialek dan kosa kata khas masing-masing daerah. Mungkin dengan lebih dulu mempelajari bahasa asli dari mana *kaghas* tersebut berasal seseorang baru bisa memahami tulisan ulunya.

Sampai saat ini belum banyak usaha untuk mengumpulkan *kaghas* yang tersebar di masyarakat, apalagi untuk menerjemahkan dan menganalisisnya. Salah satu penyebab kesulitan dalam mengumpulkan *kaghas* adalah adanya sementara masyarakat yang memiliki dan menyimpannya sebagai benda pusaka yang tidak dapat dibuka atau diperlihatkan pada orang lain, apalagi diperjualbelikan.

BAB III

CERITA MENGENAI ASAL USUL SUKUBANGSA GUMAY, SEMIDANG, DAN PASEMAH

Dalam bab terdahulu telah diterangkan bahwa ketiga suku bangsa Gumay, Semidang, dan Pasemah yang bermukim di Lahat memperlihatkan banyak kesamaan budaya. Namun untuk menelusuri keterpautan kesejarahan mereka satu sama lain cukup sulit. Dalam bab ini akan diceritakan beberapa cerita yang berkembang dalam kehidupan ketiga masyarakat itu sendiri mengenai asal usul leluhur mereka dan juga keterkaitan sosial budaya mereka satu sama lain. Cerita-cerita tersebut nampaknya termasuk kepada jenis legenda atau mitos, karena di dalam masyarakat itu sendiri ada beberapa cerita yang berlainan, dan juga ada cerita-cerita yang sama akan tetapi tersendiri untuk mengumpulkan, menganalisa dan memiakhmilah mana yang termasuk cerita legenda atau memang sejarah dari masyarakat pendukung cerita itu sendiri. Selain itu menurut penuturan mereka semua cerita lama tersebut didapatkan secara turun temurun dan belum pernah ada yang mencatat dan membukukan cerita tersebut. Alasan ini sedikit diragukan karena para pencerita pada masa sekarang adalah orang-orang yang tidak bisa dan tidak berminat kepada *khagas* atau naskah kulit kayu berisi tulisan *ulu*.

Cerita-cerita lama yang mereka kisahkan itu sebenarnya cukup menarik, antara lain karena ada yang mengungkapkan bahwa leluhur orang Gumay, Semidang, dan Pasemah itu adalah keturunan para dewa, ada pula yang menganggap diri dan golongan mereka sebagai keturunan dari bangsawan Jawa atau dewa dari Jawa, dan ada pula yang menganggap bahwa leluhur mereka adalah keturunan bangsawan dari dataran India. Pada dasarnya cerita-cerita tersebut sangat diwarnai oleh sikap subyektif dan etnosentrisme, sehingga kalau dibanding-bandingkan akan timbul pertentangan satu sama lain.

Dalam laporan hasil penelitian ini kami hanya akan mengungkapkan beberapa versi cerita yang kami peroleh dari para responden secara sambil lalu. Artinya tanpa niat terencana untuk merekam seluruh cerita-cerita rakyat yang beredar dalam masyarakat suku-suku bangsa yang ada di daerah lahat ini. Dalam wawancara mendalam seringkali responden dipancing untuk berperan aktif memberikan informasi dengan lebih dulu diminta untuk bercerita tentang legenda-legenda asli yang diketahuinya. Diharapkan dengan disajikannya cerita-cerita mengenai asal usul ini, pembaca akan mendapatkan sedikit gambaran bagaimana kira-kira keterkaitan ketiga kelompok etnik itu satu dengan yang lainnya, sekaligus mungkin akan mendapat sedikit gambaran mengenai latar belakang kebudayaan mereka.

3.1 Cerita-cerita Rakyat Gumay

Cerita 1 :

Dalam cerita ini dikemukakan bahwa orang Gumay percaya bahwa pada awalnya orang Pasemah, Gumay, dan Semidang adalah satu kelompok juga, dan sama-sama berasal dari keturunan dewa. Menurut cerita orang tua-tua terdahulu puyang-puyang yang menurunkan mereka adalah keturunan para dewa, yang turun ke dunia dalam berbagai cara, namun sebenarnya dewa yang menurunkan itu adalah satu, hanya wujud penampilannya saja yang berbeda dari satu keturunan ke keturunan lain.

Dewa yang menjadi puyang (yang juga berarti leluhur) orang Gumay menurut cerita turun ke dunia tidak melalui kandungan, tetapi turunnya melalui buah *linggau*. Pada suatu tempat. Setelah dicari-cari kian kemari akhirnya diketemukan bahwa sumber suara itu berasal dari buah linggau. Kemudian buah itu dibuka oleh orang-orang Gumay dengan menggunakan kuku, tiba-tiba dari dalam buah itu keluarlah sang dewa. Secara legendaris kejadian itu dikaitkan orang Gumay dengan bentuk kuku jari-jari tangan mereka yang agak mencong karena dahulu dipakai untuk membuka kulit buah linggau yang cukup keras itu.

Cerita 2.

Dalam cerita ini diyakini bahwa sebenarnya orang Gumay, Semidang, dan Pasemah merupakan tiga serangkai yang pada awalnya menciptakan jagat Sumatra Selatan. Walaupun mereka nampaknya terpisah-pisah, namun sebenarnya masing-masing mempunyai posisi sendiri-sendiri yang saling mengisi untuk menguasai daerah ini. Sewaktu pertama kali datang ke daerah ini mungkin sudah ada kelompok lain yang juga ingin menguasai tempat yang masih berupa hutan luas itu. Terjadilah peperangan melawan kelompok lain yang sering mereka sebut sebagai suku bangsa Kamkam ini adalah kelompok orang-orang Cina yang mungkin singgah ke tempat itu. Bagaimanapun pada zaman lama tersebut sebenarnya daerah ini adalah daerah yang tidak berpenghuni (karena penduduk aslinya yang mendirikan mengalit-mengalit sudah punah?). Jadi pada waktu itu tidak sedang tidak ada penduduk asli selain dari ketiga suku bangsa tersebut.

Menurut cerita ini pula orang Gumay, Semidang, dan Pasemah, semula datang dari sebuah kerajaan di India. Pada waktu itu di kerajaan besar tersebut ada seorang pertapa yang menyepikan diri di pegunungan Himalaya. Pertapa ini akhirnya mendapat petunjuk bahwa di salah satu tempat di Asia Tenggara terdapat satu daerah berpulau-pulau yang disebut Bangka-siu, namun ia tidak tahu persis di sebelah mana letak pulau itu.

Pulau itu dikatakan masih kosong, hanya hutan belantara dan binatang liar yang ada, sama sekali belum dihuni oleh manusia. Bangkasiu berarti pulau yang terserak-serak. Hasil pertapaan tersebut disampaikan si pertapa kepada rajanya. Karena tertarik mendengarnya kemudian sang raja memerintahkan pegawai kerajaan untuk mencari pelaut-pelaut ulung dari seluruh negeri dan dikumpulkan diistananya. Setelah terkumpul beberapa orang pelaut berpengalaman, maka diutuslah mereka itu untuk mencari pulau yang dimaksudkan oleh sang pertapa.

Kepergian kelompok pertama ini ternyata tidak membawa hasil sama sekali, mereka hilang begitu saja tanpa kabar berita apa-apa. Lalu dikirimlah kelompok kedua, namun kelompok inipun tidak hilang pula tanpa kabar. Karena penasaran akhirnya sang raja mengirim kelompok ketiga. Padahal sebenarnya ketiga kelompok masih hidup dan malah bertemu di satu pulau, mereka itulah yang akhirnya menjadi orang Gumay, Semidang, dan Pasemah. Pada waktu itu yang namanya Palembang sama sekali belum ada, dan sebenarnya orang-orang Palembang itu adalah orang dari daerah Lahat dan lembah Gunung Dempo juga asalnya.

Cerita 3 :

Menurut cerita ini pada zaman dahulu kala pernah terjadi banjir besar hingga menenggelamkan seluruh daratan. Pada waktu daratan mulai surut terlihatlah beberapa dataran tinggi di wilayah Sumatera Selatan, antara lain Gunung Dempo, Bukit Abung, Bukit Tunjuk (Bukit Serelo), Pulau Panjang, dan lain-lain. Pada waktu air mulai surut itu semua dataran tinggi tersebut nampak seperti pulau-pulau saja. Pada waktu itulah leluhur orang Gumay, Semidang dan Pasemah datang berge-lombang-gelombang, artinya mereka datang satu kelompok demi satu kelompok. Mereka datang ke pulau-pulau tersebut dengan menggunakan perahu. Kabarnya di desa Pulau Panjang sampai sekarang dapat disaksikan bekas-bekas bukti kedatangan nenek moyang (puyang) orang Gumay menambatkan tali jung (perahu). Bahkan menurut versi ini dapat di tempat ter-

sebut dapat pula disaksikan bangkai perahu yang sudah membatu. Orang Gumay yakin bahwa di tempat inilah pertama kali puyang datang dan bermukim dan baru setelah itu tersebar ke tempat-tempat lain yang belum berpenghuni. Dari puyang yang berdiam di Pulau Panjang inilah orang-orang Gumay sekarang berasal (lihat juga lampiran mengenai silsilah orang Gumay).

3.2 Semidang

Cerita 1 :

Orang-orang Semidang sekarang katanya berasal dari seorang nenek moyang atau puyang yang bernama Bardin yang juga mempunyai gelar Serunting Sakti atau Si Pahit Lidah. Bardin ini merupakan anak dari Bujang Semidang atau Nyadikah Jagad atau Dewa Batara yang berasal dari daerah Pagaruyung (di Minangkabau Sumatra Barat?). Namun sebenarnya ia bukanlah puyang pertama yang datang ke daerah Lahat ini, karena ada yang lebih dulu lagi yang telah tinggal di sini, yaitu puyang yang menurunkan orang Gumay. Jadi cerita ini pada dasarnya mengakui bahwa urutan kedatangan di wilayah ini diyakini pula sebagai urutan senioritas. Golongan puyang teruta yang tinggal di daerah ini adalah puyang orang Gumay, lalu puyang orang Semidang, dan terakhir baru puyang orang Pasemah.

Cerita 2 :

Bagi suku bangsa Semidang ada dua puyang yang paling penting, yaitu Puyang Serunting Sakti dan Puyang Atung Bungsu. Cerita mengenai kepuyangan ini terbatas pada Puyang Serunting Sakti saja karena cerita mengenai Puyang Atung Bungsu kurang banyak diketahui. Puyang Serunting Sakti ini dinamakan juga Puyang Diwe Semidang atau Puyang Lidah Pahit. Sebenarnya nama asli puyang ini adalah Bardin yang merupakan anak tertua dari Bujang Semidang atau Puyang Nyadikah Jagad atau Dewa Batara. Tidak diketahui darimana datangnya Bujang Semidang ini dan sejak kapan ia tinggal di daerah yang sekarang banyak ditinggal oleh orang Semidang.

Serunting Sakti sebenarnya bukan merupakan anak yang pertama, tetapi sang ayah menganggapnya sebagai anak tertua, *anak tue turun kedian* (anak tertua yang lahir kemudian). Ia mempunyai tujuh orang saudara yang ada secara gaib dan tiba-tiba, masing-masing diberi nama sesuai dengan tempat ia mula-mula diturunkan atau ditemukan, yaitu : (1) Semidang Lalang, turun dan ditemukan di padang alang-alang, (2) Semidang Nggiang, ditemukan di bawah rumpun nggiang; (3) Semidang Resam, ditemukan di semak-semak resam, (4) Semidang Tatal, ditemukan di onggokan tatal; (5) Semidang Besi, ditemukan di onggokan besi; (6) Semidang Kabu, ditemukan di bawah pohon kabu; (7) Semidang Akut-akuk, yaitu anak temuan yang diakui sebagai anak sendiri (*anak akuan*).

Sebenarnya Serunting Sakti juga turun ke dunia secara gaib, yaitu turun dari matahari sewaktu matahari baru memancarkan sinarnya. Begitu keluar dari *kebungan* (kain bedungan bayi) ia langsung dapat berjalan dan berbicara. Dengan rambut panjang dikuncir ia mengempit seekor ayam jago, biring kenaning namanya, dan ia langsung mengadu ayam itu dengan tunggul kayu.

Isteri Serunting Sakti yang pertama adalah seorang bidadari dari kayangan. Ia mendapatkan bidadari tersebut ketika tujuh orang bidadari sedang mandi di pemandian *tangge malik* pada malam bulan purnama. Salah seorang bidadari, yaitu Bidadari Bungsu, dapat ditawannya dengan mencuri selendangnya. Lalu ia menyembunyikan selendang itu sehingga sang bidadari tidak dapat terbang kembali ke tempat asalnya.

Selanjutnya bidadari itu diperisteri oleh Serunting Sakti dan kemudian mendapatkan seorang anak yang diberi nama Burung Binang dengan gelar Bujang Gunung. Pasangan ini berkedudukan di Dusun Ulak Engkudu (di daerah Musi Ulu). Setelah itu sang bidadari menghilang atau terbang kembali ke tempat asalnya sewaktu disuruh menari pada pesta perkawinan kedua Serunting Sakti dengan Kelawai Rie Tabing. Pada saat itu sebenarnya sang bidadari sedang mengandung. Begitu anaknya lahir lalu dihanyutkan di sungai setelah diberi

nama Burung Binang. Akhirnya bayi itu ditemukan orang di Desa Ulak Engkudu, dan kemudian menetaplah ia di situ.

Dari perkawinan dengan Kelawai Rie Tabing, Serunting Sakti memperoleh enam orang anak, yaitu (1) Serampau Sakti, berkedudukan di Dusun Retih, Besisir; (2) Serampu Jaya, berkedudukan di Dusun Keban Agung (Ogan Komering Ulu); (3) Sakti Betimbang, berkedudukan di Dusun Tanjung Karang (Muara Enim); (4) Kemantan Sakti, di Dusun Tangga Manik; (5) Sibetulak, di Dusun Tanjung Telang, Manggul; dan (6) Sibetulai, di Gumay Ulu. Dengan demikian terlihat bahwa anak-anak tersebut menyebar di seluruh tanah Pesemah (Jagat Besemah) yaitu di sembilan aliran sungai besar, yang lebih dikenal sebagai Batanghari Sembilan. Batanghari Sembilan adalah sungai-sungai Air Musi, Air Lematang, Air Enim, Air Ogan, Air Koering, Air Rawas, Air Mesuji, Air Kelingi, dan Air Selangis. Keenam anak Serunting Sakti menyebar di sembilan aliran sungai-sungai tersebut kecuali anak yang keempat, yaitu Kemantan Sakti, yang lebih suka tinggal di Dusun Tangga Manik.

Pada suatu masa itu Serunting Sakti berladang di sebelah ladang kakak iparnya atau kakak dari istrinya Kelawai Rie Tabing. Di perbatasan kedua ladang mereka ada sebatang pohon besar yang sewaktu ditebang bagian batang pohon itu berada di atas tanah wilayah Serunting Sakti dan bagian lainnya berada di atas tanah sang kakak ipar. Kemudian terjadilah suatu keajaiban, di batang kayu yang telah rebah itu tumbuh semacam jamur (*tirau*). Jamur yang tumbuh di ladang (wilayah) Serunting Sakti berupa jamur emas, sedangkan jamur yang tumbuh di ladang sang kakak ipar hanya jamur biasa. Karena merasa iri sang kakak ipar memutar batang kayu itu agar ia mendapat jamur emas. Namun setelah diputar berkali-kali tetap saja di bagian wilayahnya hanya tumbuh jamur biasa. Terjadilah percekcoakan dan perkelahian selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan karena masing-masing mempunyai kesaktian. Namun akhirnya Serunting Sakti dapat dikalahkan karena rahasia kelemahannya dapat diketahui

dari isterinya, yang sebenarnya merupakan adik kandung dari musuhnya. Akhirnya Serunting Sakti terpaksa menyingkir untuk mencari ilmu dan bertekad untuk membalas dendam. Dari perjalanannya itu ia memang memperoleh kesaktian *sipengucap*, yaitu apa saja yang diucapkannya akan langsung menjadi kenyataan, sehingga kemudian diberi juga gelar *si pahit lidah*. Selain itu ia juga memperoleh sebuah keris pusaka yang bernama *tata renjune* yang konon berasal dari Majapahit. Pada waktu itu pulau Jawa dan Sumatera masih bersatu, sehingga dapat ditempuh dengan hanya berjalan kaki.

Setelah mendapatkan kesaktian dan keris pusaka, Serunting Sakti kembali dan ingin melanjutkan pertarungannya dengan sang kakak ipar. Disepakatilah akan diadakan pertarungan di bawah pohon enau di pinggir Danau Ranau (kemudian dinamakan *enau rebu*). Sewaktu sang kakak ipar menunggu di bawah pohon enau, ia menunggu dengan posisi badan menelungkup. Pada waktu itulah Serunting Sakti menjatuhkan setandan buah enau (*beluluk*) ke tubuh sang kakak ipar. Namun karena sang kakak selain telah mempunyai kesaktian baru juga mempunyai empat buah mata, yaitu dua di depan dan dua di belakang. Karena mata yang di belakang kepala tertutup oleh rambut Serunting Sakti tidak mengetahui rahasianya, maka dengan mudah serangan itu dapat dielakkannya. Setelah itu tibalah giliran Serunting Sakti telungkup di bawah pohon enau dan sang kakak menjatuhkan *beluluk*. Serunting Sakti berteriak, "Matilah aku!". Karena ia mempunyai kesaktian *sipengucap* maka matilah dia karena ulahnya sendiri. Kemudian sang kakak turun dari pohon enau dan menyingkirkan *beluluk* yang menimpa Serunting Sakti. Ketika dilihat Serunting Sakti meninggal dengan lidah terjulur. Sang kakak merasa heran dan ia penasaran ingin membuktikan apakah lidah Serunting Sakti itu benar terasa pahit, maka dijilatlah lidah yang terjulur itu, namun sebagai akibatnya sang kakak ipar ini mati pula.

3.3 Pasemah

Cerita 1 :

Ada beberapa cerita mengenai asal usul orang Pasemah. Ada yang menganggap bahwa sebenarnya puyang-puyang orang Pasemah termasuk keturunan dewa, namun ada pula yang mengatakan bahwa mereka itu datangnya dari Jawa. Dalam cerita mengenai asal usul kedatangan orang Pasemah dari Jawa yaitu dimulai dari tokoh yang bernama Atung Bungsu, yaitu seorang puyang keturunan raja Jawa, Puyang Ratu Senuhun. Raja Jawa ini mendengar bahwa Tanah Pasemah adalah daerah yang subur dan kaya dengan hasil alam, maka puyang Atung Bungsu diperintahkan untuk pergi ke sana dan mengatur kehidupan penduduk Tanah Pasemah. Puyang Atung Bungsu berkedudukan di kaki gunung Dempo.

Dalam perjalanannya dari Jawa melalui laut dan kemudian masuk ke dalam perairan Sungai Musi, lalu mudik ke arah hulu Batanghari Sembilan, puyang Atung Bungsu bertemu dengan seorang perempuan yang sedang mencuci beras di sekitar daerah Palembang sekarang. Setelah didekati ternyata perempuan itu adalah adik kandungnya sendiri yang telah diperintahkan oleh nenek mereka di Jawa untuk menunggu daerah tersebut. Karena ketika bertemu itu si adik sedang *melembangkan* (mencuci dengan tampian) beras, maka daerah ini akhirnya disebut Pelembangan, kemudian berubah menjadi Palembang.

Selanjutnya Atung Bungsu dinasehati oleh adik perempuannya itu agar pergi ke mudik perairan sungai-sungai Batanghari Sembilan dengan menggunakan penunjuk arah sebuah timbangan emas. Apabila dalam perjalanan ia menemukan pertigaan atau pertemuan dua buah sungai, maka ia harus menimbang air dari kedua sungai itu, mana yang timbangannya lebih berat itulah jalan yang harus ia tempuh. Jadi perjalanannya adalah mulai dari menyusuri Sungai Musi kemudian masuk ke Sungai Lematang. Sesampai di Sungai Lematang ia melihat airnya penuh dengan *semah* (ikan) ketika ia beristirahat untuk mencuci beras. Daerah itu akhirnya diberi nama *Besemah*

(banyak ikannya), orang luar lebih sering menyebutnya dengan nama Pasemah.

Cerita 2 :

Dalam cerita kedua ini dipercayai bahwa puyang orang Pasemah berasal dari dewa yang turun dari langit. Keturunan dewa ini menempati daerah Gunung Dempo dan menyebar ke berbagai penjuru Tanah Besemah. Dan masyarakat Pasemah telah ada jauh sebelum daerah Palembang dihuni orang. Setelah Jagat Besemah bertambah padat penduduknya beberapa kelompok orang pergi mengarungi sungai ke arah hilir dan mulailah mereka membentuk kehidupan di berbagai tempat lain. Salah satu pemukiman keturunan orang pedalaman di bagian hilir Batanghari Sembilan ini adalah tempat yang berkembang besar menjadi sebuah kerajaan, yaitu Kota Palembang sekarang. Memang setelah menjadi kota ada beberapa orang yang kembali ke hulu. Inilah yang mungkin menyebabkan banyak orang menganggap bahwa orang Palembang banyak yang berpindah ke Tanah Pasemah, padahal sebelum itu Tanah Pasemah merupakan tanah yang merdeka tapi tidak berbentuk kerajaan. Bentuknya adalah suatu kelompok yang merdeka yang seketurunan pada satu tempat tertentu dan dipimpin oleh seorang *jurai tua*.

BAB IV KEPEMIMPINAN TRADISIONAL

4.1 Sumbay atau Jurai

Seperti telah diterangkan sebelumnya bahwa baik masyarakat Gumay, Semidang maupun Pasemah, masing-masing mempunyai nenek moyang atau *puyang* yang terpisah, walaupun dari beberapa cerita mengenai asal-usul mereka yang beredar turun-temurun, ada yang mengatakan bahwa semua itu berasal dari satu keturunan juga. Zaman dahulu orang-orang yang berasal dari satu puyang (masih termasuk satu keturunan) hidup berkelompok di suatu tempat tertentu. Kumpulan orang-orang seketurunan atau berbentuk keluarga luas terbatas (klen patri-lineal) itu disebut *suku*. Karena orang-orang yang berasal dari satu suku itu merupakan orang yang seketurunan, maka pada masa itu dilarang untuk melakukan perkawinan antara orang-orang dalam satu Sumbay. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga satu demi satu suku-suku itu menjadi besar dan juga banyak terjadi pelanggaran perkawinan, maka akhirnya diperbolehkan menikah dalam satu dalam batas-batas tertentu, seperti batasan incest dan ketentuan agama Islam.

Beberapa suku yang memiliki persamaan kepentingan dan mungkin juga karena hubungan kekerabatan yang sudah amat

dekat lalu membentuk gabungan atau konfederasi suku-suku yang disebut *sumbay* atau *jurai*. Biasanya gabungan suku-suku seperti ini berdiam di sebuah *dusun* (sebutan untuk pemukiman setingkat desa). Masing-masing suku sendiri berdiam dalam sebuah kampung di dalam dusun tersebut. Jadi dalam konsep pemukiman menetap masyarakat daerah Lahat kampung adalah bagian dari dusun.

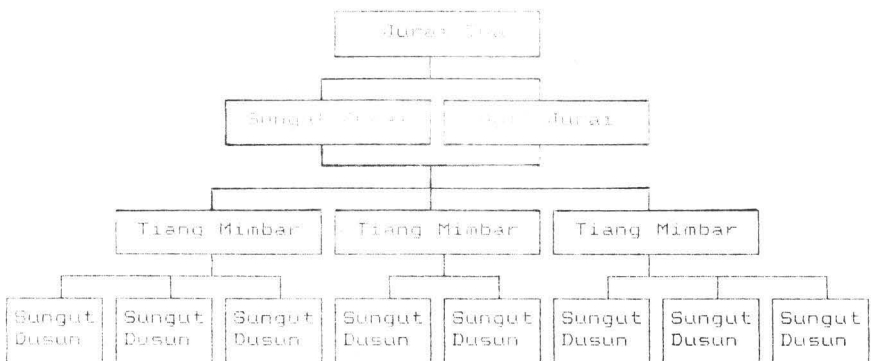
Setiap jurai atau sumbay dipimpin oleh seorang *jurai tua* atau *jurai tuwe*. Jurai tua ini diangkat dari sumbay yang dianggap sebagai keturunan langsung dari puyang pendiri jurai. Ia mempunyai kekuasaan tradisional dalam memimpin orang-orang dalam jurainya. Kekuasaan tradisional ini tidak obahnya seperti ciri-ciri yang dikemukakan Max Weber (1947 : 328) bahwa tuntutan keabsahannya didasarkan atas "suatu kepercayaan yang telah ada (*established*) pada kesucian tradisi yang amat kuno", dan biasanya kekuasaan tradisional seorang jurai tua menyangkut hampir seluruh bidang kehidupan sosio-religius komunitas jurainya. Pada masa lalu jurai tua memegang peranan penting dalam masalah bercocok tanam, kapan harus memulai mengolah sawah atau ladang, kapan harus melaksanakan panen, dan sejenisnya. Selain itu seorang jurai tua juga harus dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi, misalnya saja sengketa mengenai batas tanah milik sumbay, sengketa mengenai sistem pengairan sawah, pelanggaran susila, dan sebagainya. Jurai tua harus benar-benar mengetahui seluk-beluk adat-istiadat, dan dalam segala bentuk upacara adat ia selalu memegang peranan penting sebagai pemimpin ritus-ritus.

Dalam menjalankan tugasnya, jurai tua dibantu oleh *sungut jurai*, *apit jurai* dan *tiang mimbar*. Sungut jurai atau adalah para pembantu atau tangan kanan jurai tua yang tugasnya adalah membantu jurai tua dalam menanggulangi segala permasalahan di lingkungan jurai atau dusun mereka, seperti pelanggaran adat, sengketa tanah, dan sejenisnya. Sedangkan para apit jurai adalah semacam dewan pertimbangan yang turut menyumbangkan suaranya dan memberikan pertimbangan dalam hal jurai tua harus membuat suatu keputusan, selain itu setiap apit jurai

biasanya ini mewakili warga kampung tertentu. Apabila dalam suatu peristiwa sidang jurai tua berhalangan hadir, maka rapat sidang dipimpin oleh salah seorang apit jurai, biasanya yang tertua. Sementara tugas *tiang mimbar* adalah memanggil orang-orang untuk menghadiri sidang adat yang harus diadakan oleh jurai tua dan apit jurai. Perangkat yang lainnya adalah *sungut-sungut dusun* atau pemimpin dusun. Jadi tiap-tiap dusun ada kepemimpinan yang dapat melaporkan tentang berbagai hal yang terjadi di dusunnya baik kepada *jurai tua* maupun kepada *apit jurai*.

Walaupun nampaknya pekerjaan jurai tua ini adalah pekerjaan yang tiada henti dan tidak ada batasan waktu, namun jabatan jurai tua adalah jabatan yang tidak memperoleh imbalan langsung atau gaji berupa uang atau barang. Tetapi warga komunitas jurainya dengan rela akan memberikan bantuan apabila ia mendapat kesulitan. Sama seperti pemimpin tradisional dalam komunitas sederhana yang egaliter lain seorang jurai tua juga berladang atau bersawah seperti warga biasa. Akan tetapi dalam hal menggarap sawahnya jurai tua mendapat bantuan tenaga dari masyarakat secara sukarela, tetapi sebaliknya apabila ia dibutuhkan tenaganya oleh masyarakat, ia dapat dipanggil kapan saja.

Bagan 1
Struktur Kepemimpinan Jurai



Jabatan jurai tua adalah jabatan yang turun-temurun, biasanya jabatan ini diturunkan menurut garis kekerabatan patrilineal pada anak laki-laki pertama (*primo genitus*). Namun dalam kasus-kasus tertentu dapat saja diturunkan kepada anak laki-laki yang kedua, ketiga, atau bahkan kepada menantu laki-laki. Untuk memantapkan seseorang menjadi jurai tua maka diwariskanlah barang-barang pusaka milik jurai tua lama yang melambangkan kekhasan dari sumbay itu. Pewarisan benda-benda pusaka dan sekaligus menetapkan seseorang menjadi jurai tua adalah dilaksanakan dalam suatu upacara adat kebesaran yang biasanya disertai dengan pemotongan hewan korban, biasanya kerbau. Dengan disaksikan oleh khalayak ramai diberikanlah benda pusaka itu secara pusaka sebagai simbol kedaulatan kekuasaan adat yang dimiliki leluhur pendiri sumbaynya. Misalnya saja untuk Sumbay Semidang barang pusakanya adalah sebuah keris yang bernama *Tata Renjune*, Sumbay Ulu Lurah memiliki benda pusaka berupa sebuah tongkat yang disebut *Tungkat Mudik Lematang*, Sumbay Penjalang memiliki pusaka berupa sebatang tombak yang diberi nama *Tumbak Ulas*, Sumbay Tanjung Raye memiliki pusaka berupa sebuah pedang yang disebut *Buntang Bujuk Rentake*, dan sebagainya.

Di dalam masyarakat Pasemah ada empat buah sumbay utama dan dua buah sumbay tambahan yang mungkin datang lebih kemudian lagi. Keempat sumbay utama dan dua sumbay tambahan itu dikenal dalam prinsip kehidupan sosial politik mereka sebagai *Lampik empat merdeka dua*. *Lampik* berarti tikar, jadi *lampik empat* berarti empat buah tikar yang biasanya dipakai oleh para jurai tua setiap sumbay ketika ikut dalam "rapat besar" seluruh sumbay. Sedangkan *merdeka dua* adalah dua buah sumbay tambahan tadi. Dalam "rapat besar" semua tetua dari seluruh sumbay harus hadir, termasuk tetua dari kedua sumbay tambahan. Menurut peraturan adat suku bangsa Pasemah kedua sumbay tambahan berhak hadir akan tetapi mereka hanya boleh mendengarkan dan mengajukan usulan jika diminta. Sementara itu seluruh perdebatan dan keputusan

rapat besar hanya bisa diputuskan oleh perundingan keempat sumbay utama. Walaupun kedua sumbay tambahan tidak ikut memberikan suara, akan tetapi seluruh keputusan rapat tersebut harus dijalankannya juga oleh keenam sumbay tersebut. Keempat sumbay utama itu adalah Sumbay Tanjung Raye, Sumbay Besar, Sumbay Tanjung Anom, dan Sumbay Ulu Lurah. Tempat persidangan "rapat besar" adalah di sebuah tempat terbuka, berbentuk lapangan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon limau, karena itu disebut juga Rapat Besar di Limau. Dalam rapat besar itu masing-masing jurai tua membawa senjata-senjata atau benda-benda pusaka masing-masing. Karena biasanya senjata-senjata yang dibawa ditancapkan di tengah-tengah tanah lapang tersebut, maka tanah di tempat menjadi cekung seperti kolam, sehingga tempat itu sering pula disebut Tebat Limau.

Pada zaman dahulu "rapat besar" itu biasanya diadakan untuk menghadapi masalah-masalah besar saja, seperti untuk merumuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan adat yang akan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kesejahteraan kehidupan bersama, baik di dalam satu sumbay ataupun antar anggota satu sumbay dengan sumbay lainnya. Rapat besar yang terakhir terjadi di Tanah Pasemah adalah pada tanggal 12 Desember 1945. Pada waktu itu rapat dilakukan untuk mengusir sisa-sisa penjajahan Jepang yang masih bercokol di daerah itu. Jadi rapat besar diadakan kalau sesuatu itu sangat penting dan menyangkut kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Tahun 1945 itulah rapat besar yang terakhir dilakukan oleh para jurai tua.

4.2 Marga

Sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1975 berlaku di daerah Sumatera Selatan berjalan suatu sistem pemerintahan dengan bentuk kekuasaan yang lebih rasional dan cenderung untuk lebih birokratis untuk kepentingan kehidupan sosial politik yang lebih besar dan kompleks, yaitu sistem pemerintahan *marga*. Berbeda dengan sistem kepemimpinan tradisional

seperti sumbay atau jurai yang berorientasi kepada sikap mencucikan tradisi yang diwarisi dari para leluhur, sistem kepemimpinan marga merupakan bagian dari sistem pemerintahan otoriter di mana para pemimpinnya dipilih dan diangkat secara rasional oleh pemegang kekuasaan yang lebih tinggi lagi.

Sistem pemerintahan marga sebenarnya diciptakan oleh kesultanan Palembang Darussalam dalam upaya menguasai kehidupan politik dan perekonomian daerah-daerah yang berada di bawahnya. Pembentukan marga itu mengacu kepada *Undang-Undang Simbur Cahaya* (USC), yaitu suatu kodifikasi ketentuan hukum kerajaan yang berlaku sejak abad ke-XVII Masehi di wilayah kesultanan Palembang Darussalam. Kodifikasi Undang-undang itu dilakukan oleh Ratu Sinuhun Sending, Permaisuri Seri Sultan Sending Kenayan (1629–1636), kira-kira pada tahun 1630 Masehi, dan waktu itu masih ditulis dalam bahasa Melayu Kuno dengan aksara arab melayu. Karena itu naskah kodifikasi hukum kerajaan Palembang Darussalam tersebut sering pula disebut *Piagam Ratu Sinuhun*.

Setelah wilayah kesultanan Palembang Darussalam meluas mencakup Bengkulu, Bangka, dan Belitung, maka piagam itu disebut pula *Undang-Undang Sindang Mardika* (USM), atau Undang-undang daerah (Budenani, t.t. : 1–5). Akan tetapi menurut pengamatan USM dibuat khusus untuk mengatur pemerintahan di daerah-daerah yang langsung berada di bawah kekuasaan sultan. Masing-masing daerah dipimpin oleh seorang pejabat setingkat gubernur masa sekarang yang disebut *Rangga*, *Kerangga* atau *Tumenggung*. Karena itu wilayah mereka sering juga disebut *Ketemenggungan*. Orang-orang yang menjabat kedudukan ini biasanya masih kerabat sultan sendiri. Sedangkan USC berisi aturan-aturan bagi pemerintahan di daerah-daerah taklukan yang sebelumnya sudah memiliki sistem kepemimpinan sendiri-sendiri. Setelah daerah-daerah itu takluk kepada Palembang maka wilayah-wilayah mereka dibentuk menjadi marga-marga. Kepala suatu marga pada awalnya diangkat dari pemimpin-pemimpin tradisional setempat yang patuh kepada kerajaan, kepala marga ini disebut *Pesirah* atau *Pesirah*. Selanjut-

nya pesirah-pesirah yang banyak berjasa dan dekat dengan keluarga istana diberi gelar *Adipati* atau singkatnya *Depati*.

Sistem marga ini kemudian diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda setelah kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan pada tahun 1826. Belanda kembali membentuk marga-marga baru di lingkungan keresidenan Palembang. Setiap marga selanjutnya tunduk kepada kekuasaan Residen Palembang. Jadi pada masa itu piagam pengangkatan seorang pesirah diganti dengan *beslit* residen Palembang dan kedudukan mereka dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda berada di bawah *asisten residen* atau *kontrolir*. Sementara itu wilayah ketemenggungan seperti di Bangka dan Belitung diganti dengan *kemenduran* atau *kemandoran* dan pemimpinnya disebut *mandor besar*. Bentuk kekuasaan terakhir ini biasanya ditetapkan di daerah-daerah penghasil hasil bumi atau barang tambang yang berharga di pasaran di mana penduduknya kebanyakan adalah para kuli atau buruh kasar yang hanya mungkin diatur oleh sistem pengelolaan tenaga kerja di bawah mandor-mandor (*supervisor*).

Kembali kepada latar belakang terbentuknya USC, perlu diketahui bahwa baik kesultanan Palembang Darussalam, maupun pemerintahan Hindia Belanda rupanya tetap berhati-hati dalam menghadapi pemimpin-pemimpin tradisional yang memiliki kekuasaan teritorial genealogis setempat. Sejak dulu daerah Sumatera Selatan telah dihuni oleh beberapa puluh suku bangsa, seperti Semendo, Bermani, Gumay, Semidang, Pasemah dan lain-lain. Sungguhpun seluruh suku bangsa tersebut telah ditaklukkan, akan tetapi Sultan-sultan Palembang selalu menjaga hubungan baik dengan para pemimpin suku-suku bangsa tersebut. Dalam rangka mengatur sistem pemerintahan, terutama yang menyangkut pajak lada dan hasil bumi lain, maka suku-suku bangsa tersebut dipecah-pecah secara politis menjadi sejumlah marga. Kepala-kepala marga pada awalnya diangkat dari golongan pemimpin tradisional juga, antara lain dari keturunan pemimpin sumbay atau jurai. Kepala marga yang disebut pesirah tersebut berperan sebagai wakil sultan di daerah-daerah,

sementara itu para pemimpin tradisional setempat seperti jurai tua masih tetap memimpin kelompoknya, khususnya dalam bidang spiritual dan kekerabatan. Tindakan politis untuk memecah-belah suku-suku bangsa setempat menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang berpusat ke Palembang tersebut nampaknya amat berguna bagi pengurangan pemberontakan terhadap kesultanan karena dalam praktek kekuasaan para pesirah boleh dikatakan sedikit sekali batasnya. Mereka bagaikan raja kecil di lingkungan marganya.

Marga-marga tersebut ada pula yang masih memakai nama suku bangsa asalnya, sehingga sifatnya pun cenderung teritorial genealogis meniru batasan wilayah dan kelompok sosial lama. Tidak jarang jabatan Pesirah turun dari bapak kepada anak. Walaupun menurut ketentuan USC pesirah mestilah dipilih oleh rakyat banyak, akan tetapi dalam prakteknya kebanyakan Kepala Marga dicalonkan oleh para kepala sumbay atau jurai tua dan pemimpin adat lainnya. Pada zaman kesultanan Palembang pemilihan pesirah tersebut diawasi oleh seorang kesultanan yang akan melaporkan hasilnya kepada Seri Sultan. Kedudukan seorang pesirah terpilih disahkan oleh Seri Sultan dengan mengeluarkan sebuah piagam pengangkatan.

Sebuah marga terdiri dari sejumlah desa yang lebih umum disebut "dusun". Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yang disebut *Kerio* atau *Proatin*. Setiap dusun terdiri pula atas sejumlah "kampung" yang masing-masing dipimpin oleh seorang *penggawa*. Kepala dusun di mana Pesirah berkedudukan disebut *Pembarap*. Kedudukan pembarap lebih tinggi dari pada kerio atau proatin, karena dialah yang mewakili pesirah apabila yang bersangkutan berhalangan. Di setiap dusun dan kampung itu diadakan pula penghulu agama sebagai pemimpin *syare'at* (hukum agama). Penghulu di dusun-dusun kepasirahan disebut *Lebai*, sedangkan di setiap kampung penghulunya disebut *Khatib* atau *Mudin*. Dalam hubungan dengan pekerjaannya khatib harus membantu lebai mengurus masalah-masalah agama di lingkungan marga mereka. Khatib sendiri masih dibantu pula oleh petugas-petugas keagamaan seperti *Bilal* dan *Merbut*.

Sistem marga masih dipertahankan sampai dengan tahun 1976, yaitu dengan dijalkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1975 tentang pengaturan pemerintahan daerah. Semenjak itu marga bersama-sama dengan seluruh bentuk pemerintahan tradisional lain di seluruh Indonesia tidak lagi dipakai secara resmi. Bagian pemerintahan paling rendah secara nasional diseragamkan menjadi bentuk desa atau kelurahan. Namun sampai dengan dekade ini sistem pemerintahan marga itu sendiri masih menarik untuk dipelajari, antara lain karena sebagian bekas pesirah pemimpin marga yang jumlahnya pernah mencapai angka 500 itu masih ada yang hidup dan mempunyai pengaruh tertentu dalam lingkungan komunitasnya.

Kalau kita kembali ke masa sebelum berlakunya UU. No. 10 tahun 1975, jadi paling tidak dua dekade yang lalu, terlihat bahwa di Sumatera Selatan marga diakui keberadaannya di bawah kecamatan. Pada masa itu umumnya setiap kecamatan terbagi kepada dua sampai dengan empat buah marga, kecuali Kecamatan Semendo di Kabupaten Muara Enim yang hanya memiliki satu marga, yaitu Marga Semendo. Di Kabupaten Lahat misalnya, Kecamatan Pagaralam terdiri terdapat empat buah marga, yaitu: Marga Sumbay Besar dari Suku Alun Dua, berpusat di dusun Alun Dua; Marga Sumbay Mangku Anom dari Suku Muara Siban, berpusat di dusun Bumi Agung; Marga Semidang dari Suku Plang Kenidai, berpusat di dusun Plang Kenidai; dan Marga Sumbai Besar dari Suku Lubuk Buntak, berpusat di dusun Lubuk Buntak.

Pasirah dari setiap marga masa itu bertanggungjawab kepada Camat, dan tetap seperti pada masa Kesultanan Palembang Darussalam penghasilan pasirah berasal dari sumber-sumber "pungutan adat", seperti komisi 15 persen dari pungutan pajak pekarangan, rumah, sawah, ladang atau kebun dan ternak; pungutan pajak pekarangan, rumah, sawah, ladang atau kebun dan ternak; pungutan pada urusan pernikahan, perceraian, rujuk, pelanggaran adat dan pembunuhan; pungutan dari sewa menyewa tanah atau bumi, hutan, sungai dan *lebak*; penghasilan dari tanah pertanian atau ternak milik pasirah sendiri. Sumber-sum-

ber penghasilan proatin atau kerio dan pamong lain di bawahnya ada 26 buah dusun; Marga Sumbay Mangku Anom memiliki 19 buah dusun; Marga Semidang memiliki 9 buah dusun; dan Marga Sumbay Besar memiliki 15 buah dusun

Berkenaan dengan urusan administrasi pemerintahan, sebagai bawahan camat sebenarnya pesirah merupakan perantara, sehingga camat tidak perlu turun langsung menghadapi proatin dan kerio. Kedudukan pesirah pada masa dulu nampaknya cukup penting karena masyarakat masih menghormati jabatan yang hanya bisa diduduki oleh golongan pemimpin sumbay atau jurai itu. Setiap pesirah mempunyai gelar kehormatan sendiri, seperti Mangku Alam, Singadikane dan Singadilaga di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sungguhpun begitu tidak semuanya mempopulerkan gelar kepasirahan mereka. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, meniru penghargaan yang diberikan oleh sultan-sultan Palembang Darussalam atas pengabdian para kepala marga, tradisi pemberian gelar *Pangeran* kembali dihidup. Maksudnya tentu saja untuk mengambil hati para kepala marga tersebut. Setiap pesirah yang diberi gelar pangeran tersebut berhak memakai atribut tertentu, seperti tongkat bersalut emas, payung emas, dan pakaian kebesaran adat.

Ativitas seorang pasirah selama menyangkut masalah di dalam marganya tidak boleh dicampuri oleh pesirah lain. Ia berkuasa penuh dalam marganya, terutama dalam masalah ketertiban dan keamanan; menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan adat dalam hal perkawinan, perceraian, rujuk, pembagian harta waris, soal hutang piutang, pengesahan jual beli, pemungutan pajak; menyelenggarakan pengadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran adat seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, penculikan, perzinaan, melarikan gadis, memutuskan ikatan pertunangan secara sepihak dan sebagainya.

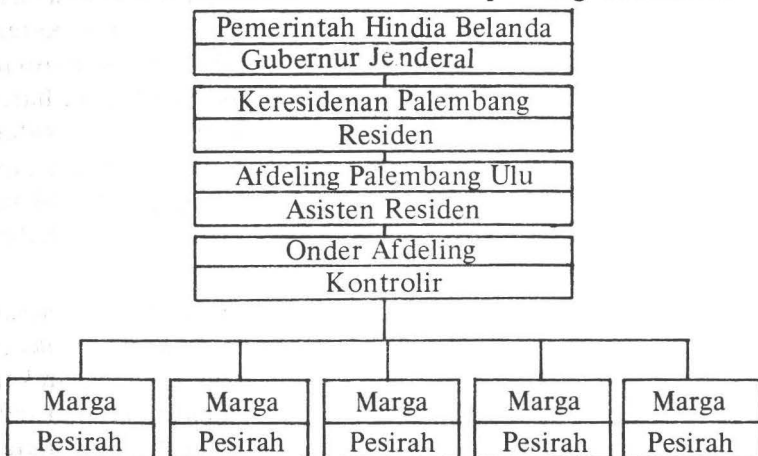
Pertikaian-pertikaian antar marga yang tidak bisa diselesaikan secara damai segera diajukan ke tengah *rapat besar marga* (seperti rapat besar sumbay), yaitu rapat yang diselenggarakan untuk memutuskan masalah-masalah antar marga. Pesirah dari marga-marga yang bersengketa dipertemukan oleh marga-marga

yang lain untuk mengajukan tuntutan masing-masing. Setelah itu rapat besar marga akan memutuskan masalah tersebut dengan mengacu kepada sumber hukum dalam USC. Jika keputusan rapat tidak ditaati oleh marga-marga yang bersengketa, maka marga-marga lain akan memaksa. Paksaan paling keras adalah *pelurakan* (pemusnahan), yaitu penyerbuan ke kampung atau ke dusun dari marga yang ingkar. Tetapi tindakan terakhir ini jarang terjadi, karena akibatnya amat berat bagi yang terhukum (Bale dkk., 1972:168).

Dengan dibentuknya marga yang dipimpin oleh seorang pesirah di daerah yang tidak atau belum mengenal marga, maka pihak Belanda dapat menguasai wilayah ini dengan mudah. Antara lain karena generasi pesirah yang diangkat oleh Belanda pada akhir abad kesembilan belas itu umumnya dapat membaca dan menulis, serta sedikit banyaknya dapat dan mengerti berbahasa Belanda. Pesirah generasi ini umumnya anak dari pesirah terdahulu dan biasanya sudah mengenyam pendidikan sekolah Belanda berkat kedudukan orang tuanya. Selain itu sebagai putra daerah yang dianggap sebagai keturunan puyang-puyang pendiri sumbay atau jurai, pesirah-pesirah generasi terakhir ini memang menguasai adat istiadat daerahnya dengan baik.

Bagan 2:

Struktur Pemerintahan Belanda sampai Tingkat Pesirah.



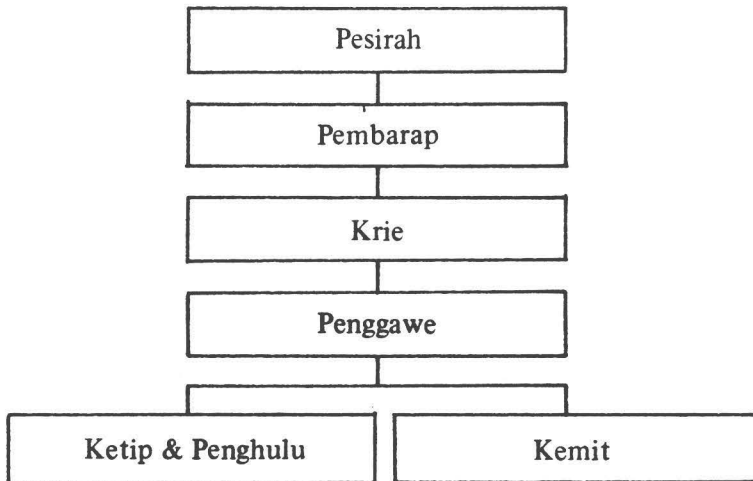
Dalam perkembangan selanjutnya seorang pesirah dapat menangkap dan mengadili anggota marganya yang menjadi seorang tertuduh, atau yang diduga melakukan kejahatan. Tentu saja untuk mengadili ini pesirah dibantu oleh pihak Belanda yaitu kontrolir, sedangkan untuk penangkapan biasanya diserahkan pada masing-masing pesirah yang akan melibatkan tenaga masyarakat. Dengan demikian tugas pemerintah penjajahan Belanda yaitu kontrolir, sedangkan untuk penangkapan biasanya diserahkan pada masing-masing pesirah yang akan melibatkan tenaga masyarakat. Dengan demikian tugas pemerintah penjajahan Belanda sangatlah diringankan dengan adanya pemerintahan marga. Semua kasus yang ada dalam satu marga tertentu akan tuntas pada tingkat itu juga.

Pada mulanya tentu saja sangat sulit bagi para jurai tua menerima keberadaan sistem marga dengan pemimpinnya yang disebut pesirah itu. Antara lain karena mengambil seluruh kekuasaan politik setempat. Namun lama kelamaan pesirah dipandang sebagai jembatan antara pemerintah Belanda dengan masyarakat, sehingga kedua pemimpin tersebut merupakan dua sayap dari seekor burung. Karena Belanda berkuasa dan mereka telah menunjuk pesirah sebagai pemimpin suatu wilayah, maka jurai tua yang sebenarnya adalah pemimpin yang muncul dari masyarakat itu sendiri tidak bisa berbuat banyak selain bekerja sama dengan pesirah. Bagaimanapun sebenarnya pesirah mengakui bahwa secara resmi di bidang adat jurai tualah yang berkuasa.

Belanda dalam membagi-bagi wilayah marga cenderung lebih mempertimbangkan lokasi kewilayahan daripada mempertimbangkan jumlah jurai yang berada dalamnya. Ini dimaksudkan agar lebih mudah mengatur pemerintahannya sesuai dengan struktur yang sudah ada, yaitu jabatan Gubernur Jenderal, Residen, dan seterusnya (lihat bagan 2). Kalau kita lihat dari bagan itu, sebenarnya di bawah Afdeling Palembang Ulu terdapat beberapa Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang

kontrolir, antara lain: Palembang Ulu, Lematang Illir, Tebing Tinggi, Pasemah, dan Musi Ulu.

**Bagan 3 .
Struktur Kepemimpinan Marga Gumay**



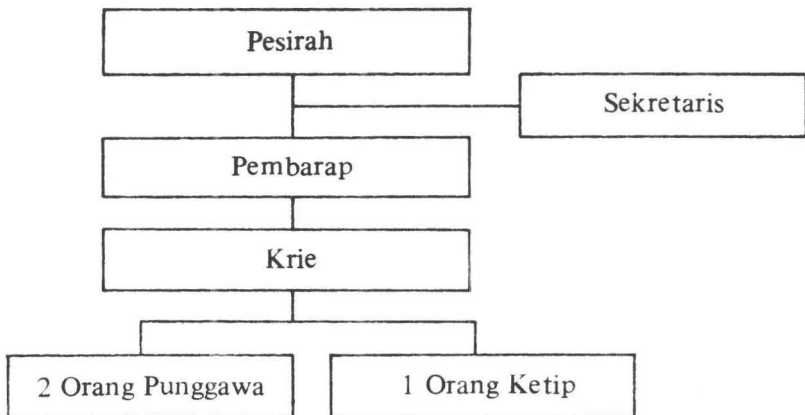
Pada zaman penjajahan Belanda, pada tiap-tiap marga adakalanya terdiri atas 24 atau 25 dusun, tetapi ada pula yang hanya 8 dusun. Hal ini disebabkan pembagian marga itu berdasarkan kewilayahan seperti dijelaskan di atas. Dusun-dusun yang tercakup di dalam satu marga sebenarnya banyak yang tidak merupakan satu keturunan (sumbay). Jadi dalam satu marga mungkin ada dua atau tiga jurai tua. Kemudian nama marga itu diambil dari nama suku bangsa ditambah dengan nama dusun tempat pesirah yang pertama menetap. Misalnya di daerah Pasemah ada Marga Sumbay Tanjung Raya Muara Payang. Nama ini diambil dari daerah Sumbay Tanjung Raya dan pesirah yang pertama kali menjabat adalah orang dari dusun Muara Payang. Penamaan marga menurut cara Belanda ini memang memudahkan orang untuk mengingatnya, namun hal ini membuat sum-

bay-sumbay yang anggotanya tidak pernah menjadi pesirah hampir terlupakan.

Pada masa lalu di daerah Lahat ini cukup banyak jumlah marga, namun sampai saat ini belum ada yang mencoba menelusuri berapa jumlah yang tepat marga dan pesirahnya. Pada saat dibubarkannya marga saja diperkirakan ada sekitar 500 orang pesirah. Tercatat ada 6 marga Gumay di daerah Lahat, yaitu: Marga Gumay Teimbak, Marga Gumay Ulu, Marga Gumay Talang, Marga Pagar Gunung, Marga Perangai, dan Marga Gedung Agung.

Di daerah Pasemah tercatat ada 12 marga, yaitu: Marga Muara Payang, Marga Mangku Anom, Marga Alun Dua, Marga Pelang Keniday, Marga Lubuk Bunta, Marga Bumi Agung, Marga Pasemah Ulu Mana Ilir, Marga Pasemah Ulu Mana Ulu, Marga Tanjung Kurung, Marga Keban Jati, dan Marga Mula Ulu.

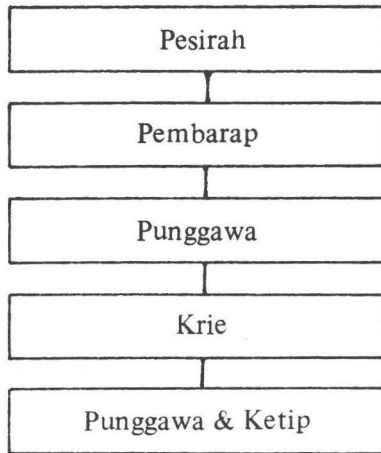
Bagan 4:
Struktur Kepemimpinan Marga Pasemah



Di daerah Tebing Tinggi tercatat ada 14 marga, yaitu: Marga Wulung Dusun, Marga Tiang Pumpung Suku Ulu, Marga Sikap Labuan, Marga Kejahatan Mandi Musi Ilir, Marga Tanjung

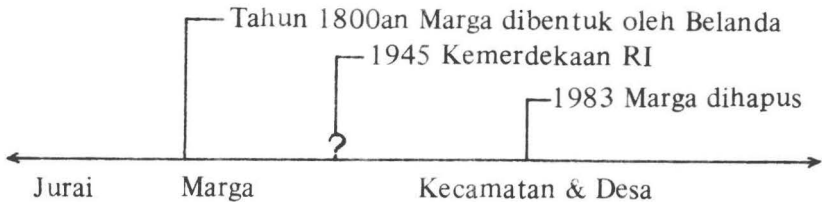
Raya, Marga Gunung Raksa, Marga Muara Pinang, Marga Muara Danau, Marga Babatan Marga Seleman, Marga Karang Dapo, Marga Tejajin, Marga Padang Lai, dan Marga Ulu Musi.

Bagan 5:
Struktur Kepemimpinan Marga di Tebing Tinggi



Sistem marga ini sebenarnya mengalami beberapa periode, yaitu periode kesultanan Palembang Darussalam, pemerintahan Hindia Belanda, penjajahan Jepang, periode kemerdekaan, dan periode setelah Indonesia merdeka. Pada periode Hindia Belanda mulailah dibentuk sistem marga sebagai bagian dari sistem pemerintahan jajahan. Periode penjajahan Jepang dan periode kemerdekaan termasuk periode yang singkat, namun terdapat kejadian penting seperti beberapa perjuangan melawan Jepang yang dilakukan para pemimpin tradisional lama, yaitu para jurai tua di daerah Pasemah. Dalam periode penjajahan Jepang dan periode kemerdekaan banyak pengungsian penduduk ke daerah lain. Pada periode permulaan Indonesia merdeka pesirah masih mempunyai tempat dalam struktur pemerintahan sampai tahun 1983.

Bagan 6:
Sejarah Sistem Pemerintahan Tradisional di Lahat.



Pesirah pada zaman penjajahan Belanda mempunyai banyak tugas yang dipertanggung-jawabkan kepada kontrolir, namun para mereka juga mendapatkan imbalan atau gaji resmi. Pendapatan mereka hanyalah dari hasil bumi atau pertanian yang ia garap sendiri, dan kadangkala dibantu oleh masyarakat secara sukarela. Namun dalam menjalankan aktivitas marga, ada pemasukan ke dalam kas marga yang dikelola oleh sekretaris marga, yaitu dari pajak jiwa sejumlah Rp. 250,00 per tahun dan upah pungut sejumlah 10% dari hasil. Disamping itu ada juga pendapatan yang tidak rutin, yaitu dari sewa bumi bagi orang berladang dengan cara bagi hasil dan biasanya hal itu dipungut per tahun.

Setelah Indonesia merdeka keberadaan marga dan pesirahnya masih tetap dipertahankan. Pada masa ini pesirah mendapat gaji dari pemerintah daerah yang disebut uang sumbangan sebesar Rp. 10.000,00 per bulan yang biasanya diterima tiga bulan sekali. Pendapatan lainnya dari marga itu masih tetap ada, yaitu dari pajak, upah pungut dan sewa bumi, namun semua itu harus masuk ke kas pemerintah daerah berupa IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah (sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan, PBB). Pada masa ini seorang pesirah dilantik oleh Bupati atas nama Gubernur, yang biasanya dihadiri oleh unsur Muspida dan DPRD. Dengan demikian pesirah dengan marganya makin mendapat tempat dalam masyarakat dan tentu saja pemerintah, tetapi sebaliknya peranan jurai tua sebagai pemimpin tradisional yang amat bersifat lokal makin tenggelam.

Secara resmi sistem marga dihapuskan di Sumatera Selatan pada tanggal 1 Maret 1983. Pada hari itu seluruh pesirah di Propinsi Sumatera Selatan dikumpulkan, dan pada saat itu pula sistem marga dinyatakan bubar, tidak berlaku lagi. Diperkirakan pada saat dibubarkannya marga ini ada sekitar 500 orang pesirah yang hadir, yang berarti ada sejumlah itu pula marganya. Para pesirah yang dulunya merupakan pesirah hasil pemilihan rakyat diberi pesangon Rp. 100.000,00 perorang, sedangkan pesirah yang bukan hasil pemilihan oleh rakyat diberi pesangon Rp. 50.000,00 perorang.

Uraian di atas menunjukkan suatu gambaran bahwa bertahannya sistem pemerintahan marga sejak zaman kesultanan Palembang Darussalam, lalu pemerintahan Hindia Belanda dan sampai kepada masa-masa awal Orde Baru Republik Indonesia, adalah karena USC yang mereka jadikan sumber hukum adatnya dibuat berdasarkan tradisi-tradisi kebudayaan lama dari masing-masing masyarakat suku bangsa. Suku-suku bangsa tersebut sekan-akan menjadikan sistem marga sebagai pintu keluar mereka jika berhadapan dengan kekuasaan politik yang jauh lebih besar, sambil tetap mempertahankan keberadaan sistem kepemimpinan lokal yang bersifat pemujaan terhadap kesucian keturunan dan kekerabatan. Sebaliknya pemerintahan pusat dari sistem kekuasaan yang lebih besar dan kompleks pada ketiga zaman tersebut di atas memanfaatkan pula sistem marga ini sebagai alat pengatur ke dalam sistem sosial tradisional masing-masing suku bangsa tanpa harus masuk langsung ke dalamnya. Dengan tidak mencampuri urusan di dalam masing-masing suku bangsa pemerintah pusat bisa menghemat tenaga dan sekaligus menjaga kekuasaan hegemoni jauh dari kehidupan lokal.

Dengan mengambil inspirasi dari sistem marga yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Ratu Sinuhun Sending dari kesultanan Palembang Darussalam, Belanda sengaja membiarkan sistem-sistem kepemimpinan setempat yang amat berorientasi kepada penyucian kekuasaan adat warisan leluhur serta bersifat patrimonialisme tersebut. Diharapkan dari pengaktifan identitas masing-masing kelompok akan terbentuk kotak-kotak yang ti-

dak akan mungkin terpadu atau terintegrasi menjadi kekuatan yang lebih besar. Walaupun begitu politik *devisa et impera* Hindia Belanda ini tidak berhasil karena melupakan kekuatan hubungan antar suku bangsa yang kompleks.

4.3 Lembaga Pemangku Adat

Pada saat pembubaran marga itu diumumkan pula bahwa dalam hal-hal yang menyangkut adat perana pesirah masih tetap diakui, walaupun kenyataannya tidak sepenuhnya seperti itu. Setelah beberapa lama akhirnya disadari oleh pemerintah daerah bahwa orang-orang yang tahu dan mau berkecimpung dalam masalah adat amatlah kurang. Sementara itu perkembangan zaman menuntut agar simbol-simbol kepemimpinan tradisional dihidupkan kembali sebagai salah satu unsur kebudayaan asli yang dapat dibanggakan dan diketengahkan, maka beberapa tahun kemudian dibentuklah *Lembaga Pemangku Adat*, yaitu semacam lembaga permusyawaratan yang bertugas membicarakan masalah adat istiadat setempat. Anggota-anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mampu menjembatani sesama warganya dan antara warganya dengan pemerintah daerah. Lembaga ini didirikan di setiap kecamatan, dan disahkan dengan suatu upacara peresmian oleh Bupati kepala daerah tingkat II.

Anehnya dalam lembaga adat yang rekayasa oleh pemerintah daerah seperti ini peranan jurai tua dan para pemimpin agama sama sekali tidak disebut, walaupun dalam kenyataannya tokoh-tokoh pemimpin tradisional seperti ini masih hidup dan mendapat tempat tersendiri dalam masyarakatnya. Beberapa informan mengatakan bahwa alasan mengapa jurai tua banyak yang tidak diikuti menjadi anggota Lembaga Pemangku Adat ini, adalah karena mereka umumnya tidak bisa tulis baca dan walaupun bisa tulis baca usianya masih muda dan tidak berpengalaman dalam bidang adat masyarakatnya sendiri.

4.4 Pemimpin Agama (Islam)

Menurut sejumlah informan agama Islam masuk ke daerah Lahat secara perlahan-lahan melalui wilayah daerah aliran sungai-sungai Batanghari Sembilan sejak zaman kesultanan Palembang Darussalam. Sewaktu kolonialis Belanda menaklukkan daerah ini dan menerapkan sistem marga seperti di daerah-daerah lain di Sumatera Selatan agama Islam memang sudah ada tetapi belum sepenuhnya diyakini oleh masyarakat setempat. Menurut informasi Bapak Johan Hanafiah, seorang Budayawan Palembang, sebagian penduduk di 'pedalaman Palembang' ini oleh pada masa penaklukkannya oleh kolonialis Belanda masih dikategorikan sebagai penyembah batu, penyembah roh, atau pagan. Sehingga dianggap bahwa perkembangan agama Islam di daerah ini tidak secepat pada masyarakat-masyarakat Melayu lainnya di Sumatera.

Dari data tentang perkembangan masyarakat dan kebudayaan di daerah Lahat ini dapat diasumsikan, bahwa fungsi dan peranan pemimpin agama (Islam) nampaknya tidak pernah menonjol. Boleh dikatakan sejak masuknya agama Islam dan sejak diterapkannya sistem marga di daerah ini para pemimpin agama tidak sempat memimpin di depan. Dalam sistem pemerintahan marga yang berlangsung cukup lama itu misalnya, kedudukan tokoh-tokoh pemimpin agama berada di bawah pesirah kepala marga, dan di tingkat desa berada di bawah kerio. Menurut pengamatan terakhir pada masa sekarang pun tidak ada pemimpin agama (Islam) yang cukup menonjol dan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakatnya.

BAB V

PERANAN PEMIMPIN TRADISIONAL MASA SEKARANG

5.1 Posisi Jurai Tua

Seperti telah diterangkan dalam bab-bab terdahulu, bahwa kekuasaan pemimpin tradisional seperti jurai tua mengalami puncaknya pada zaman sebelum pengaruh kesultanan Palembang dengan sistem marganya masuk. Pada waktu itu jurai tua benar-benar merupakan satu-satunya pemimpin yang ditaati di setiap jurai, dan hubungan antara para pemimpin jurai cukup baik. Masyarakatnya memandang jurai tua sebagai simbol kesucian dan kebesaran tradisi serta permuliaan para puyang, yaitu para leluhur yang menurunkan mereka. Pemitosan tokoh jurai tua bagaimanapun terkait erat dengan sistem keyakinan dan pengetahuan masyarakatnya pada masa itu. Pemujaan roh para puyang (leluhur) merupakan unsur religi asli yang menjadi alat pengendali sosial sekaligus mengintegrasikan komunitas yang bersifat teritorial genealogis ini. Selain itu penerapan sistem patrimonilisme dan azas kesenioritan serta kharisma yang diselimuti oleh keyakinan masyarakat kepada kekuatan-kekuatan gaib yang dimiliki para keturunan puyang, menyebabkan jurai tua dianggap sebagai tokoh yang paling banyak tahu tentang berbagai hal kehidupan.

Setelah munculnya sistem marga dengan kepalanya yang disebut pesirah, maka posisi jurai tua memang agak tersisih walaupun banyak orang menyatakan bahwa mereka itu merupakan dua serangkai yang saling mengisi. Namun dalam perkembangan selanjutnya posisi jurai tua makin melemah saja dan cenderung dilupakan, dan sebaliknya posisi pesirah semakin kuat, mungkin karena menjadi ujung tombak pemerintah pusat di pelosok-pelosok daerah. Hal lain yang paling menonjol sebagai penyebab makin kuatnya pengaruh pesirah adalah karena faktor pendidikan. Pesirah pada akhir abad kesembilanbelas adalah orang-orang yang telah mengecap pendidikan formal (Belanda), karena ini merupakan salah satu sayap bagi setiap pejabat pesirah sehingga boleh dikatakan seluruh pesirah dapat membaca dan menulis huruf latin. Selain itu juga mereka sedikit banyaknya dapat pula berbahasa Belanda sehingga memudahkan komunikasi dengan pihak Belanda dalam melaksanakan seluruh kebijaksanaannya dalam memerintah daerah itu.

Dalam perkembangan selanjutnya banyak pula masyarakat yang mulai mengenyam pendidikan walaupun tidak penuh atau lengkap. Namun dengan demikian mulai pula terbuka pengetahuan masyarakat, sehingga pihak pemerintah dalam mengambil keputusan mulai banyak menggunakan logika yang dipercayai rakyat banyak. Akibatnya posisi pesirah sebagai pemimpin formal yang intelek semakin kuat karena dekat dengan masyarakat, terutama yang berpendidikan, karena mereka dapat berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Di lain pihak, jurai tua masih tetap tidak mengalami perkembangan, mereka hanya mengandalkan kharisma dan benda pusaka sebagai lambang bahwa ia benar-benar keturunan puyang pendiri dusun atau sumbaynya untuk mendapatkan simpati publik. Mereka sangat kurang memperhatikan pendidikan formal. Mayoritas jurai tua sampai kini adalah orang-orang yang butahuruf, karena tidak mengenyam pendidikan formal. Jadi di sini terlihat adanya kesenjangan pendidikan antara jurai tua dengan masyarakatnya sendiri.

Pada masa sekarang ini nampaknya jurai tua sudah hampir tidak mempunyai fungsi lagi dalam masyarakat. Antara lain karena dalam masalah adat istiadat saja sudah banyak di antara para jurai tua itu yang tidak menguasainya lagi, penyebabnya karena pada zaman Belanda masalah adat istiadat pernah pula didominasi oleh pesirah. Memang ada satu atau dua penduduk yang masih meminta nasihat kepada jurai tua, terutama apabila menghadapi masalah dalam kehidupan sosial, namun mayoritas masyarakat lebih mengandalkan aparat pemerintah seperti Kepala Desa, Camat, polisi dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya apabila terjadi sengketa tanah, pada zaman dahulu jurai tualah yang dimohon datang untuk menengahi sengketa itu, karena dianggap dialah yang paling banyak mengetahui silsilah tanah dan juga batas-batasnya. Namun sekarang masyarakat tidak dapat lagi mengandalkan jurai tua karena banyak dari mereka yang sudah tidak mengetahui lagi silsilah tanah dan batas-batasnya. Banyak pula di antara mereka yang dibesarkan di luar wilayah dusunnya sehingga sedikit sekali pengalaman dan pengetahuannya mengenai lingkungan masyarakatnya. Sebagai akibatnya sebagian orang yang berhak menduduki jabatan adat tersebut enggan mengaktifkan simbol-simbol kekuasaan tradisional yang diwarisinya. Sementara itu ada pula tokoh-tokoh pemuka sumbay tertentu yang ingin mengaktifkan kembali kekuasaan tradisional yang mereka warisi. Golongan terakhir ini umumnya orang-orang yang kehidupan sosial ekonominya termasuk baik dibandingkan dengan yang lain, dan nampaknya terpengaruh oleh kemampuan suku-suku bangsa lain mengaktifkan kembali tradisi adat masing-masing sehingga membutuhkan pula simbol-simbil adat untuk mengesahkan identitas kesumbayan dan kesukubangsaaannya.

Sementara itu lemahnya peranan kepemimpinan tradisional yang asli seperti itu membuat para jurai tua kurang disegani di mata masyarakat. Hanya suatu hal yang masih dihargai orang terhadap jurai tua, yaitu bahwa ia masih menyimpan benda-benda pusaka tertentu sebagai lambang bahwa ia adalah keturunan langsung dari puyang pendiri dusun atau sumbay

dan karena itu adalah pemilik kekuasaan sebagai jurai tua cuma sekedar simbol dari sumbay (keluarga luas terbatas) tertentu, tetapi ia sama sekali tidak mempunyai pengaruh politikus pada komunitas sumbay itu sendiri.

Beberapa orang dalam hal-hal tertentu memang masih segan terhadap para jurai tua, terutama generasi tua di mana ia masih mempunyai orientasi terhadap adat dan tidak dapat melupakan bahwa bagaimanapun para jurai tua itu mempunyai peranan simbolik sebagai penentu garis genealogis dalam masyarakatnya. Tetapi bagi para generasi muda yang sekarang merupakan golongan mayoritas dari masyarakat, jurai tua hanya dipandang sebagai nama saja dan kekuasaan mereka atas masyarakat hanyalah pada masa lalu, sekarang tidak lagi. Generasi muda kelihatannya hanya mau mengenal sistem kekuasaan rasional dari pemerintahan yang sekarang ini, dengan tokoh-tokoh pejabat yang jelas batas-batas kekuasaannya seperti Kepala Desa, Camat, polisi, Bupati, atau Gubernur.

Nampaknya pada masa sekarang posisi para jurai tua ini sangat sulit sekali untuk bisa kembali kepada kekuasaan seperti yang mereka miliki sebelum zaman penjajahan Hindia Belanda. Dilihat dari perjalanan sejarahnya, memang popularitas mereka turun naik. Maksudnya ketika sebelum Belanda masuk daerah ini, merupakan zaman keemasan para jurai tua. Setelah Belanda masuk kewibawaan mereka mulai dirongrong oleh pesirah. Pada saat ini terlihat sekali para pesirah sedikit demi sedikit menggeser peranan jurai tua, terutama dalam hal adat. Namun kemudian pada masa perjuangan kemerdekaan para jurai tua ini pernah unjuk gigi melawan penjajah untuk mencoba mengembalikan pamor mereka, dan ini berhasil sehingga masyarakat sempat melihat kembali kepada mereka (misalnya perlawanan di daerah Pasemah melawan Jepang). Namun setelah Indonesia merdeka, peranan pesirah masih dipertahankan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian posisi jurai tua kembali tenggelam. Anehnya hal ini tetap berlangsung sampai sekarang walaupun pesirah dengan marganya telah dibubarkan oleh pemerintah. Antara lain terlihat dari diabaikannya peranan

jurai tua, sehingga dalam pembentukan semacam lembaga musyawarah adat yang sedang hangat di Sumatera Selatan, yaitu *Lembaga Pemangku Adat*, jurai-jurai tua sama sekali tidak disertakan. Alasan yang sering dikemukakan pihak pemerintah adalah karena jurai-jurai tua itu umumnya tidak bisa menulis dan membaca.

5.2. Posisi Mantan Pesirah.

Sistem marga seperti telah dijelaskan di atas, pada awalnya dibentuk pada zaman kesultanan Palembang Darussalam, kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi ujung tombak pemerintahan oleh sistem penjajahan Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda sistem marga boleh dikatakan hal yang baru bagi masyarakat daerah Lahat yang mungkin belum sempat dikuasai oleh kesultanan Palembang Darussalam, dan sebelumnya mereka hanya mengenai bentuk jurai dalam pemerintahan tradisionalnya. Sistem marga mereka terima karena dipaksakan oleh Belanda dengan mengambil bentuk sistem pemerintahan tradisional dari daerah Palembang, maka mau tidak mau di daerah ini terbentuk juga sistem itu. Tentu saja sistem baru menggeser sistem yang lama, dan nampaknya hal ini berhasil. Dengan demikian sistem pemerintahan di Sumatra Bagian Selatan menjadi seragam, yaitu berbentuk marga yang dikepalai oleh seorang pesirah. Seluruh pesirah akan sama dalam sepakterjangnya karena mereka mempunyai pedoman satu yaitu Undang-Undang Simbur Cahaya, yang telah dipakai sejak zaman kesultanan Palembang.

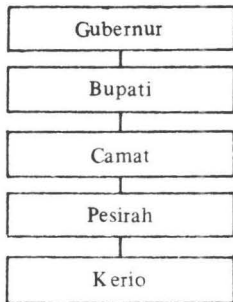
Pada zaman Hindia Belanda Pesirah-pesirah mengalami masa jaya karena sedikit demi sedikit diberi beberapa kekuasaan. Pada mulanya hanya menjalankan administrasi wilayah tertentu, lalu diberi kepercayaan dalam bidang adat, kemudian diberi wewenang menangkap dan mengadili orang yang berbuat kejahatan. Untuk memacu prestasi kerja para pesirah, meniru kebiasaan kesultanan Palembang Darussalam, maka Belanda juga

menjalankan strategi pemberian gelar bagi pesirah yang berprestasi baik selama minimal 10 tahun, gelar tersebut adalah pangeran.

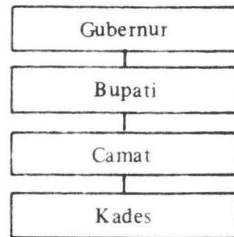
Posisi pesirah ini sempat agar tersisih di daerah Pesemah pada saat para jurai tua dengan menghidupkan kesatuan antar sumbay melalui lembaga *Lampik Empat Merdeka Dua* mengadakan perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Namun setelah Indonesia merdeka, mereka kembali diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam hal mengurangi administrasi pemerintahan dan adat istiadat setempat saja, karena hal-hal lainnya seperti mengadili orang diambil alih oleh pengadilan, penangkapan ditangani oleh polisi, dan secara birokratis pemerintahan kedudukan mereka berada di bawah Camat. Pada tahun keluarlah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1975, diikuti oleh Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1979 sistem pemerintahan desa dan jabatan Kepala Desa (Kades), dan hal ini tentu saja semakin menyudutkan posisi pesirah.

Jadi beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, sistem marga masih tetap bertahan sampai akhir pada tanggal 1 Maret 1983 dihapuskanlah sistem itu dengan surat keputusan Gubernur, sehingga otomatis secara administratif dan juga adat, para pesirah tidak lagi mempunyai wewenang dan kewajiban dalam mengatur masyarakat. Namun memang ada sementara masyarakat masih meminta bantuan atau nasihat kepada pesirah, seperti juga halnya kepada jurai tua, karena mereka menganggap bahwa pesirah merupakan orang yang berpengetahuan luas termasuk juga dalam hal adat istiadat. Dibubarkannya sistem marga di Sumatra Selatan pada tanggal 1 Maret 1983, memang termasuk lambat. Kelambatan itu disebabkan oleh karena sistem baru, yaitu adanya perangkat seperti Kepala Desa, dianggap belum cocok.

Bagan 7.
Hierarkhi Pemerintahan Daerah.



Sebelum 1 Maret 1983



Setelah 1 Maret 1983

Walaupun pada saat pembubaran marga diumumkan bahwa pesirah masih tetap mengurus hal-hal yang menyangkut adat istiadat, tapi dalam kenyataannya tidak demikian. Berbagai urusan masyarakat itu telah terkotak-kotak di mana setiap masalah mempunyai jalurnya sendiri-sendiri, misalnya urusan batas-batas tanah adalah urusan Kepala.Desa dan Camat, urusan sengketa dan perkelahiran ditangani posisi, dan sebagainya. Hal-hal demikian pada masa lalu amalah urusan adat, jadi harus ditangani oleh pesirah dan biasanya dibantu oleh jurai tua.

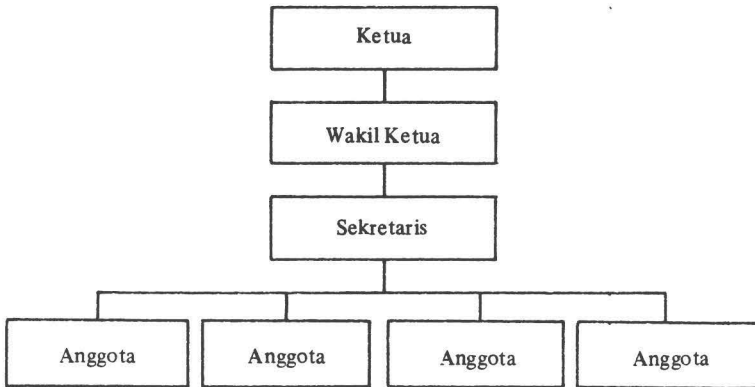
Jadi posisi pesirah di dalam masyarakat sekarang ini tidak jauh berbeda dengan posisi jurai tua, hanya punya keterangan nama di masa lalu. Beberapa orang dari mereka, terutama yang mempunyai latar belakang pendidikan dan masih mengetahui seluk belum adat, akhir-akhir ini banyak yang diangkat jadi Pemangku Adat oleh pemerintah.

5.3. Posisi Pemangku Adat

Pembentukan Lembaga Pemangku Adat adalah melalui Perda (Peraturan Daerah), sehingga pengangkatan para pemangku adat menurut surat.keputusan (SK) Bupati. Pencalonan anggota pemangku adat sebenarnya dimulai dari Kepala Desa, di mana ia mengusulkan suatu.daftar nama orang-orang yang berdomi-

sili di desanya dan mengetahui seluk beluk adat dengan baik, lalu sampai ke Camat dan kemudian Bupati. Susunan organisasi Lembaga Pemangku Adat adalah sebagai berikut :

Bagan 8 :
Susunan Organisasi Pemangku Adat.



Kebanyakan orang yang duduk dalam organisasi Lembaga Pemangku Adat sekarang ini adalah bekas pesirah, namun ada juga beberapa orang bekas jurai tua dan yang lainnya adalah anggota masyarakat biasa yang mempunyai kecakapan dalam adat istiadat dan dapat baca-tulis. Selain pemangku adat di tingkat kecamatan, sebenarnya ada juga pemangku adat di tingkat kabupaten. Idealnya pemangku adat ditingkat kabupaten dapat mengkoordinasikan pemangku adat di kecamatan sehingga langkah dan tujuan dibentuknya itu menjadi jelas. Namun tampak dalam kenyataannya bahwa tidak ada komunikasi antara pemangku adat di kabupaten dengan pemangku adat di kecamatan, sehingga para pemangku adat di kecamatan merasakan tidak ada kegiatan yang harus dilakukan oleh mereka karena menunggu "hubungan" dengan pemangku adat di tingkat yang lebih tinggi. Mengapa mereka mempunyai pandangan demikian, salah satu penyebabnya adalah adanya anggapan bahwa dibentuknya pemangku adat sekarang ini adalah karena perintah dari atas, sehingga bagi mereka

yang di bawah harus menunggu instruksi lagi dari atas. Padahal pada saat pembentukannya telah dijelaskan mengenai peran dan tugas para pemangku adat ini.

Para bekas pesirah menganggap bahwa pembentukan Lembaga Pemangku Adat ini adalah untuk mengaktifkan kembali sistem marga yang telah lama dihapus. Tetapi kondisi sudah terlalu jauh berbeda, sehingga pemangku adat tidak dapat berbuat banyak dalam menjalankan tugasnya karena tidak mempunyai wewenang penuh seperti pesirah dengan marganya. Dulu pesirah dapat memanggil anggota masyarakat karena selain sebagai pimpinan administrasi pemerintah di daerah ia juga kepala adat, sekarang pemangku adat tidak bisa memanggil karena hanya merupakan kumpulan orang yang dianggap tahu banyak mengenai adat istiadat. Pemangku adat tidak dapat memerintahkan kapan saatnya. Mulai menanam padi, menuai dan sebagainya karena ada orang lain yang lebih berhak dan dianggap mengetahui lebih banyak mengenai masalah pertanian misalnya saja para penyuluh pertanian.

Jadi posisi Lembaga Pemangku Adat sekarang ini yang terlihat hanyalah merupakan suatu badan yang memberikan konsultasi kepada kepala desa dalam bidang adat istiadat. Hubungan pemangku adat dengan kepala desa adalah hubungan yang setara dan lepas sehingga tidak ada yang menjadi atasan atau bawahan. Dan konsultasi yang diberikan pemangku adat kepada kepala desa kalau timbul masalah-masalah yang berkenaan dengan adat, hanyalah berupa sumbang pikiran yang lebih banyak tergantung dari sang kepala desa itu sendiri apakah akan menerima atau tidak. Di lain pihak para pemangku adat ini berhadapan juga dengan para generasi muda yang mudah tidak banyak tahu lagi tentang adat sekaligus juga tidak menghargai adat. Setiap kegiatan yang mereka lakukan tidak mau melibatkan dan juga tidak mau dicampuri oleh para pemangku adat. Hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang menimbulkan ketegangan-ketegangan, dan masalah yang ada menjadi tidak terselesaikan. Para pemangku adat dan juga orang-orang tua banyak yang malas untuk memberikan sumbang pikir dan pengalaman karena situasi seperti itu, sedangkan generasi muda menganggap sudah saatnya kegiatan mereka tidak dicampuri oleh adat.

5.4. Posisi Pemimpin Agama (Islam)

Pada zaman sebelum pemerintahan kolonialis Hindia Belanda dengan sistem marganya kedudukan pemimpin agama Islam belum begitu mantap, karena daerah Lahat pada saat itu memang baru memeluk agama Islam. Walaupun dalam struktur kepemimpinan marga pemimpin agama juga mendapat tempat tersendiri baik pada tingkat dusun maupun kemargaan, akan tetapi peranan mereka sama sekali tidak menonjol, antara lain karena dibatasi pada urusan peribadatan saja. Dewasa ini kepemimpinan agama sudah bebas mengembangkan pranatanya sendiri, akan tetapi tradisi umat yang cukup lama berada dalam pengaruh kekuasaan kepala marga yang asional dan cenderung sekuler belum banyak memberikan posisi penting bagi kepemimpinan agama ini. Seperti pengakuan sejumlah informan, bahwa rakyat daerah Lahat dalam beragama baru kulitnya saja. Mereka lebih sibuk mengurus kebutuhan duniawi yang semakin lama semakin tidak terkejar, daripada menyeimbangkan diri dengan kebutuhan akhirat (beribadat). Sehingga menurut para informan pandangan hidup warga yang kurang berpegang kepada agama ini menyebabkan fungsi dan peranan pemimpin agama juga tidak begitu diperhatikan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kepimpinan tradisional di daerah Lahat telah menempuh perjalanan sejarah perkembangan kebudayaan yang panjang dan bervariasi. Memang tidak diketahui dengan jelas sejak kapan dan bagaimana awal mula terbentuknya masyarakat dengan sistem kepemimpinan aslinya itu, namun berdasarkan data dan informasi tercatat adanya bentuk kesatuan hidup sosial yang telah lama ada dan terikat kepada hubungan genealogis (seketurunan) tertentu yang biasanya menempati wilayah yang diakui menjadi hak penguasaan kelompoknya secara turun temurun. Bentuk kesatuan sosial tersebut lebih dikenal dengan nama *sumbay* yang mungkin sama seperti kategori *marga* pada orang Batak atau *suku* pada orang Minangkabau. Pemimpin dari kesatuan sosial yang disebut *jurai tua* inilah bentuk kekuasaan tradisional yang paling tua dalam masyarakat Lahat yang terdiri dari suku bangsa Gumay, Semidang dan Pasemah tersebut.

Kepemimpinan tradisional yang memperoleh kekuatan dari dalam lingkungan masyarakat pendukungnya sendiri di daerah Lahat ini telah sejak lama mengalami penurunan fungsi dan peranan. Sejarah perkembangan kepemimpinan di daerah ini memang membuktikan betapa makin ditinggalkannya sistem

kepemimpinan yang paling asli seperti ketua sumbay yang disebut jurai tua itu. Faktor pertama dan utamanya memang dari sumber keabsahan kedudukan jurai tua itu sendiri. Rakyat nampaknya semakin lama semakin meninggalkan kepercayaan warisan nenek moyang yang dimantapkan karena pensucian tradisi yang amat kuno.

Namun perubahan sikap rakyat banyak juga mengalami beberapa tahap sesuai dengan kekuatan sistem kepemimpinan lain yang lebih mampu mengendalikan kehidupan publik. Pertama adalah pada saat mereka beberapa tahap sesuai dengan kekuatan sistem kepemimpinan lain yang lebih mampu mengendalikan kehidupan publik. Pertama adalah pada saat mereka berada dalam sistem marga, kekuasaan ini mendapat keabsahan berdasarkan hukum (legal) yang bersumber dari kepercayaan terhadap peraturan-peraturan dan hak bagi mereka yang memegang kedudukan, berkuasa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut untuk mengeluarkan perintah. Sistem marga yang diterapkan Belanda dengan mencontoh kesultanan Palembang memang bersumber dari suatu Undang-undang tertulis, yaitu Undang-undang Simbur Cahaya. Kekuasaan seorang pasirah kepala marga yang didukung oleh peraturan-peraturan berdasarkan hukum jelas lebih rasional dan lebih memaksa. Jadi faktor kedua yang melemahkan fungsi dan peranan jurai tua sebagai pemimpin tradisional paling tua adalah adanya sistem kekuasaan yang lebih rasional dan lebih memaksa orang untuk mematuhi-nya karena memiliki sanksi hukum serta perangkat hukum yang jelas batas-batas kekuasaannya. Seperti kita ketahui dari sudut sejarah perkembangan sistem kepemimpinan kemargaan tersebut semakin lama semakin memperoleh kejelasan kekuatan hukum, sampai akhirnya sistem inipun dihapuskan pula, diganti dengan sistem kepemimpinan formal dari kesatuan negara besar yang lebih kompleks.

Faktor ketiga yang juga melemahkan dan mengenyampingkan fungsi dan peranan kepemimpinan tradisional tertua adalah perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Pertama adalah akibat masuknya pengaruh sistem pengetahuan dan keyakinan

baru yang menolak pemitosan leluhur yang berlebih-lebihan, yaitu masuknya agama Islam yang jelas-jelas mempunyai sistem kepemimpinan sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Keterikatan individual ke dalam kesatuan sosial adat lama seperti kepada ikatan suku dan sumbay semakin lemah dengan makin banyaknya orang yang terpelajar, belum lagi akibat pengaruh sistem ekonomi pasar dan teknologi modern. Secara keseluruhan perubahan-perubahan sosial dalam kehidupan sub-suku bangsa di lahat menyebabkan fungsi dan peranan jurai tua semakin dianggap tidak sesuai dengan kemajuan zaman.

Fungsi dan peranan jurai tua yang masih tersisa hanyalah sebagai simbol tradisi dan identitas kesukubangsaan yang diaktifkan sewaktu-waktu oleh masyarakat setempat. Rasa bangga akan simbol tradisi dan identitas kesukubangsaan ini diperkuat dengan koleksi simbol-simbol konkrit berupa benda-benda (*regalia*) kuno peninggalan leluhur. Rupanya memang ada beberapa pihak yang ingin mengaktifkan kembali semua kekuasaan jurai tua, tapi keinginan mereka nampaknya lebih didasari oleh alasan kebanggaan kepada latar belakang leluhur. Rupanya memang ada beberapa pihak yang ingin mengaktifkan kembali semua kekuasaan jurai tua, tapi keinginan mereka nampaknya lebih didasari oleh alasan kebanggaan kepada latar belakang leluhur. Sedangkan satu-satunya keabsahan kekuasaan pewaris jabatan jurai tua yang tinggal hanyalah benda-benda kuno yang dianggap sebagai simbol kekuasaan tradisional tersebut.

Sementara itu sistem kepemimpinan tradisional berbentuk marga pada akhirnya juga dihapuskan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sungguhpun sistem kepemimpinan ini sifatnya lebih rasional karena bersumber kepada hukum dan peraturan mengenai kekuasaan yang jelas dan tertulis disertai pula dengan sanksi-sanksi hukumnya, namun tidak bisa ditolak sistem ini masih berakar kepada tradisi dan patrimonialisme setempat. Dalam sub-bab Marga di atas telah dijelaskan bahwa seorang pesirah pemimpin marga dipilih dari golongan

an orang-orang penting dalam masyarakatnya. Sebagian besar malah berasal dari keturunan jurai-jurai tua yang dianggap berjasa kepada pemerintah pusat, sehingga sikap mendua dari pasirah masih besar. Selain, dalam lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia sistem marga terlalu bersifat kedaerahan dan sama sekali tidak efektif bagi sistem pemerintahan negara dengan administrasi politiknya yang kompleks dan moderen. Sistem marga beserta dengan sistem-sistem kepemimpinan tradisional di daerah-daerah lain sama sekali tidak baik bagi pengelolaan sistem pemerintahan daerah yang terpadu dan mencerminkan manajemen administrasi negara yang kokoh. Tidak heran jika akhirnya semua sistem kekuasaan tradisional tersebut dihapuskan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1975, dan diganti dengan sistem pemerintahan daerah yang seragam dan menyeluruh.

Tumbangnya pemerintahan marga dengan demikian disebabkan oleh suatu faktor utama, yaitu karena sistem marga adalah bagian dari sisa-sisa sistem birokrasi pemerintah kolonial Belanda yang jelas-jelas ditunjukan untuk kepentingan negara induk semata-mata. Bagi penguasa yang penting bagaimana supaya rakyat terkendali dan memberikan pajak serta keuntungan lain bagi kelangsungan hidup pemerintahan Hindia Belanda yang harus pula membiayai negara induknya, Nederland. Sementara itu pembangunan masyarakat setempat amat tergantung kepada imbalan bagi besarnya sumber daya yang dapat mereka berikan kepada pemerintah pusat. Mengingat dasar dari pembuatan sistem marga sejak zaman kesultanan Pelembang Darussalam, menurut Undang-undang Simbu Cahaya memang ditujukan kepada pengendalian perdagangan hasil bumi seperti lada dan kopi, serta untuk mengatur pemungutan pajak. Pemerintah Hindia Belanda tidak perlu susah-susah membuat aturan baru, sisitem ini langsung mereka ambil alih dan kembangkan ke seluruh daerah Sumatera Selatan yang dulu mungkin belum sempat dikuasai oleh kesultanan Pelembang, antara lain daerah Pasemah. Entah dengan sengaja atau tidak, Belanda sempat pula membiarkan terjadinya suksesi pewarisan

jabatan pesirah secara keturunan, karena ada daerah di mana jabatan pesirah dijabat terus menerus oleh keturunan pesirah terdahulu.

Namun dibandingkan dengan jurai tua, posisi bekas pasirah sampai dengan saat-saat terakhir ini jauh lebih baik. Sungguhpun tidak lagi memiliki kekuasaan berdasarkan hukum legal, namun pengaruh psirah dalam kehidupan sosial sehari-hari masih kuat. Semua itu disebabkan karena dalam jabatan kepesirahan dulu unsur setempat memang tidak bisa dihindarkan, pada masa itu pasirah bagaikan raja kecil di lingkungan marganya, karena ia berkuasa bukan hanya sebagai pejabat pemerintah tetapi juga berkuasa dalam masalah kehidupan adat istiadat. Kekuasaannya sebagai pejabat pemerintah memang telah hilang, akan tetapi kekuasaannya dalam masalah adat masih tersisa. Khususnya karena pesirah tahu banyak mengenai masalah pertanahan di lingkungan bekas marganya. Seperti diuraikan di bab-bab di atas tugas pasirah waktu itu bukan hanya mengurus pajak tetapi juga dalam masalah perkawinan, perceraian, pembagian harta warisan, jual beli tanah, sawah dan ladang, serta segala macam hutan dan piutang para warganya. Para bekas pasirah yang masih hidup memang masih dihargai warganya karena sisa-sisa kekuasaan masa lalu itu masih ada kaitannya dengan kepentingan mereka di masa sekarang.

Namun semenjak tokoh-tokoh bekas pasirah bukan lagi sebagai pemimpin formal maka campur tangannya dalam kehidupan sosial warganya sering dianggap tidak pada tempatnya. Sementara itu kasus-kasus konflik sosial yang berkaitan dengan masalah adat-istiadat setempat semakin banyak dan tidak bisa lagi ditangani oleh para pejabat Kepala Desa atau Camat. Di sudut lain usaha pemerintah untuk memibna dan mengembangkan kebudayaan daerah ikut mendorong pemerintah daerah Sumatera Selatan untuk menghidupkan kembali simbol-simbol kekuasaan tradisional sekedar untuk memperlihatkan bahwa kebudayaan daerah yang diangkat memang terakar dari tradisi yang kuat. Bentuk pranata tradisional yang kemudian ditampilkan adalah Lembaga Pemangku Adat, yaitu semacam lembaga

sosial masyarakat yang direkayasa oleh pemerintah daerah untuk memecahkan berbagai hal yang menyangkut adat istiadat atau tradisi di lingkungan desa masing-masing. Namun lembaga sementara masih dalam penyesuaian diri dengan kondisi kemasyarakatan setempat, mengingat posisi keanggotaan yang selalu menempatkan Camat sebagai ketua dan kedudukan mereka cenderung berada di pihak pemerintah.

Fungsi dan peranan pemimpin agama (Islam) nampaknya tidak menonjol, karena sejak masuknya agama Islam dan sejak diterapkannya sistem marga pemimpin agama tidak sempat memimpin di depan. Dalam sistem marga yang berlangsung cukup lama misalnya pemimpin agama kedudukannya berada di bawah pesirah kepala marga, dan di tingkat desa berada di bawah kerio. Menurut pengamatan terakhir pada masa sekarang pun tidak ada pemimpin agama (Islam) yang menonjol dan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan sehubungan dengan tujuan kita untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan, maka dapat kita simpulkan bahwa :

1. Fungsi dan peranan pemimpin tradisional di daerah Lahat telah mengalami beberapa perubahan. Sungguhpun terjadi beberapa kali pergantian sistem kekuasaan dan kepemimpinan secara tradisional, akan tetapi sampai saat ini boleh dikatakan sistem kepemimpinan tradisional paling tua yaitu jurai tua tetap bertahan walaupun fungsi dan perannya sudah sedikit sekali. Penyebabnya adalah dasar keabsahan kekuasaan jurai tua yang berasal dari pemitosan dan pensucian tradisi warisan leluhur yang masih diakui oleh sebagian warga masyarakat sebagai simbol tradisi setempat.
2. Sebaliknya fungsi dan peranan bekas pesirah sebagai sisa-sisa sistem kekuasaan rasional pertama yang dikenal oleh masyarakat daerah Lahat hanya bertahan selama yang bersangkutan masih hidup. Penyebabnya tidak lain karena dasar keabsahannya tidak sekuat dan sedalam yang dimiliki oleh jurai tua. Pengaruh bekas pesirah yang masih tersisa

adalah karena tokoh inilah pemimpin tradisional sekaligus pemimpin rasional yang terakhir banyak berperan di bidang kehidupan adat istiadat lingkungan masyarakat marganya.

3. Sementara itu fungsi dan peranan Lembaga Pemangku Adat masih dalam taraf uji coba. Lembaga ini akan lebih kuat jika unsur-unsur di dalamnya lebih memberi tempat kepada para pemimpin tradisional lain yang sekarang terlupakan, dan keanggotaannya tidak dibatasi hanya bagi tokoh masyarakat yang bisa tulis baca saja, tetapi lebih mementingkan kemampuan dan kharisma tokoh yang lahir dari rakyat daerah itu sendiri.
4. Fungsi dan peranan pemimpin agama terlihat lemah, padahal potensi mereka dalam bidang sosio religius sangat besar untuk menunjang pembangunan moral dan mental masyarakat di daerah ini. Seyogyanya fungsi dan peranan para pemimpin agama ini diangkat dan diberi tempat yang lebih baik oleh pemerintah daerah terutama dalam rangka "pengendalian" sosial dan "pembentukan" mentalitas warga masyarakat.
5. Keempat jenis kepemimpinan tradisional yang masih ada ini satu sama lain nampaknya tidak berada dalam hubungan koeksistensi yang menguntungkan masyarakat. Masing-masing berdiri sendiri dan sibuk mengembangkan strategi asal dapat bertahan keberadaannya. Seyogyanya Lembaga Pemangku adat menjadi salah satu pranata bagi hubungan koeksistensi yang harmonis bagi keempat bentuk kepemimpinan tradisional tersebut.

Jadi hipotesa umum kita sudah terjawab, bahwa kepemimpinan tradisional masyarakat asli setempat yang dapat bertahan memang yang memiliki tuntutan keabsahan yang didasarkan atas suatu kepercayaan yang telah lama ada pada kesucian tradisi yang amat kuno. Tapi dengan sedikit perbaikan, bahwa untuk bertahan kekuasaan tradisional tersebut tidak berarti harus sangat berpengaruh ke dalam seluruh struktur sosial. Sehingga ke dalam tesa ini perlu ditekankan adanya unsur perubahan sosial dan strategio adaptasi sebagai variabel terikat bagi pertahanan sistem kepemimpinan tradisional tersebut.

BIBLIOGRAFI

Budenani (t.t.)

Undang-undang Simbur Tjahaja jang Terpakai di Pedalaman Palembang. Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan, Kementerian P.P. dan K. Jakarta.

Bale, Djenen dkk. (1972)

Sumatera Selatan Dipandang Dari Sudut Geografi Sejarah dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional, Direktorat Jendral Kebudayaan, Jakarta.

De Fille, De Roo (1961)

Dari Zaman Kesultanan Palembang, Bharatara, Jakarta.

Hanafiah, Johan (1989)

Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan. CV. Haji Masagung, Jakarta.

Masyhuri (1983)

Perdagangan Lada da Perubahan Sosial Ekonomi di Palembang 1790—1825, Tesis dalam bidang studi Sejarah Indonesia, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.

- Jusaki, Achmad (1992a)
 'Panglima Perang Gumai Tuah Raja ', 1,2,3, dalam *Harian Sriwijaya Post*, Juni 1992.
- (1992b)
 'Menyibak Hikayat-hikayat 'Bumi Seganti Setungguan' yang terpendam', dalam *Harian Sriwijaya Post*, Juli 1992.
- Sahlins Mahall D. (1968)
Tribesmen, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Service, Elman R. (1971)
Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective, second edition. New York: Random House.
- Kartodirdjo, Sartono (1984)
Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial. Jakarta. LP3ES.
- Hunter, David E. and Philip Whitten eds. (1976)
Encyclopedia of Anthropology. London: Harper and Row, Publisher.
- Weber, Max (1974)
The Theory of Social and Economic Organization. Edited by Talcot Parsons, New York: Oxford University Press.

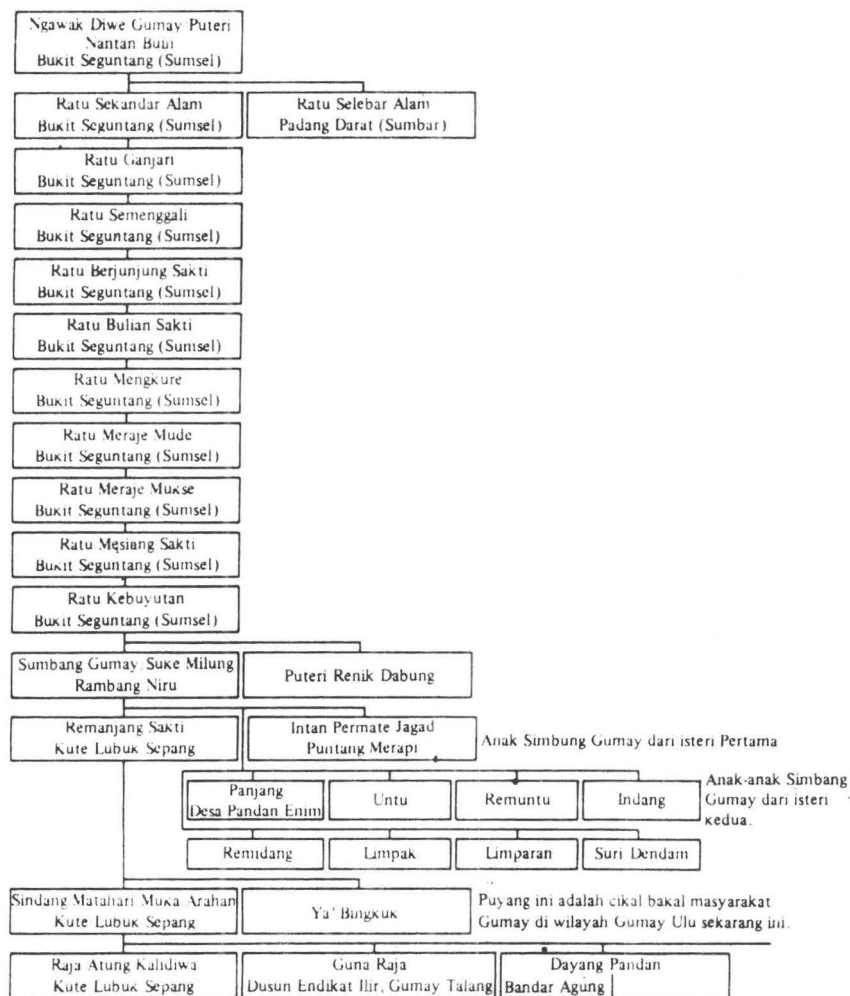
LAMPIRAN—LAMPIRAN

1. Lampiran I, Daftar Responden:

01. Saman Loear, 62 tahun, Pemangku Adat di Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara.
02. Sumar, 73 tahun, Pemangku Adat di Kel. Bumi Agung, Kec. Dempo Utara.
03. Satria S. Gumay, S.H., 39 tahun, Adik Jurai Tua Gumay, Bandarjaya, Lahat.
04. Aspin Gumay, 42 tahun, Jurai Tua Gumay, Desa Lubuk Sepang, Lahat.
05. Badillah, 72 tahun, Jurai Tua Semidang, Kel. Pelang Keniday, Kec. Dempo Selatan.
06. A. Muhi Stam, 63 tahun, Pesirah Sumbay Tanjung Raya Suku Muara Payang.
07. Dung Cik Ning, 70 tahun, Pesirah Wulung Dusun Tebing Tinggi.
08. Camat Dempo Utara, Kota Administratif Pagar Alam.

LAMPIRAN 2 : Keturunan Gumay.

(Disusun oleh : Satria U.S. Gumay, S.H., Lahat)



3. LAMPIRAN 3, Transkripsi Wawancara Mendalam

1. Nama responden : Sumar, 73 tahun (Lahir 1919).

Pemangku Adat, Kel. Bumi Agung, Kec. Dempo Utara, Volkschool Kelas 3.

Daerah ini terdiri atas 4 sumbay (keturunan) asli, kemudian ada lagi 2 sumbay tambahan. Jadi semua itu dinamakan Lampik Empat Merdeka Dua. Lampik berarti tikar, empat tikar ditambah dengan 2 kelompok keturunan yang merdeka. Empat sumbay itu adalah sumbay Ulu Lurah, Sumbay Besar, Tanjung Anom, dan Tanjung Gayeu; sedangkan dua kelompok keturunan merdeka adalah Semidang dan Penjulung. Merdeka dua tidak dapat memberikan atau mengajukan usul, mereka hanya hadir saja, tetapi keputusan yang didapatkan dari hasil rapat harus dilakukan atau diakui oleh keduanya.

Tempat bersidang Lampik Empat adalah Limau, yang merupakan tempat terbuka atau lapangan. Masing-masing kelompok yang hadir harus membawa senjata pusaka (tombak, pedang, keris, dan lain-lain). Senjata api belum ada. Senjata pedang itu ditancapkan di tanah sehingga lama kelamaan tanah menjadi seperti kolam, maka disebutlah Tebat Limau.

Dalam rapat itu akan dibicarakan undang-undang, yaitu undang-undang jagat besemah. Undang-undang itu adalah :

- *Nek urang ne urang, nek dewe nek dewe*; punya orang yang punya orang, punya kita ya punya kita.
- *Serama pepageh depat balek*, yaitu pembagian apapun selalu harus adil seperti pembagian dari 10 kalau dibagi dua masing-masing harus dapat 5.
- *Utang bayar pituang tanggap*i, yaitu harus selalu berusaha untuk membayar hutang dan apabila mempunyai piutang harus selalu mengingatkan sipeminjam namun dengan cara yang baik. Tidak membuat malu orang tersebut.
- *Janji nunggu harte betaruh*, yaitu kalau ada orang berkumpul mengatakan janji maka ia harus menepati janji itu. Tidak bisa menepati janji itu dengan tenaga mungkin saja

dapat diganti dengan uang atau barang. Kalau tidak akan berakibat menyembab (bengkak).

Selain undang-undang di atas ada lagi yang disebut mendeu (perbandingan), ini ada 4 yaitu :

- *Mendeu tamperoka*, buah yang terlihat manis tetapi kalau dimakan pahit sekali. Jadi bentuk ini adalah manusia yang berbicara manis tetapi punya niat yang tidak baik.
- *Mendeu gula*, yaitu manusia yang manis tapi ia menginginkan sesuatu.
- *Mendeu durian*, yaitu di luar berduri di dalamnya manis dan harum. Ini berarti bahwa manusia yang omongnya besar tetapi hatinya bagus.
- *Mendeu padi*, yaitu kian berisi kian menunduk.

Ada lagi perumpamaan mengenai ulah manusia, yaitu :

- *Ilang wani, ilang caye, ilang bangse, ilang baratan*. *ilang wani* artinya adalah orang yang diajak membicarakan adat tidak mengerti, juga agama dan tata negara. Ini berarti segala tidak mengerti sehingga tidak mempunyai keberanian. *Ilang caye* adalah manusia yang tidak mempunyai pakaian, sehingga tidak ada cahaya dari dirinya. *Ilang bangse* adalah manusia yang berkeluarga yang tidak mempunyai rumah. Babi saja punya rumah, maka manusia pun harus punya walaupun terbuat sederhana sekali dari bambu. *Ilang beratan* adalah tidak mempunyai padi sehingga ia selalu meminta ke tetangga. Ini berarti nampak di muka umum dan membuat malu.
- *Gegalang*, yaitu rasa terhalang untuk bertemu karena sesuatu perbuatan seperti kabal duri, kempenan, tulangan, atau galang jati sehingga membuat sulit untuk bertemu seseorang.

Beberapa pantangan :

- *Nube ulu mandian*, artinya meracun atau menuba di bagian

hulu untuk mencari ikan padahal di daerah hilir adalah tempat orang mandi.

- *Nutuh ranting petinggiran*, artinya ulah manusia yang mengharapakan benda atau harta orang.
- *Membuang bayang merampas jungut*, ini diibaratkan dengan sebatang pohon di kebun yang ditebang akhirnya merusak kebun itu sendiri. Jadi mendekati orang lain namun sanak familinya sendiri diterlantarkan.
- *Netak kulak mandai lawai*, artinya netak = dikurangi; kulak = takaran, jadi seseorang yang apabila mengukur/ menakar untuk orang lain selalu mengurangi.

Pemimpin sumbay adalah jurai tua. Setelah jurai tua adalah sungut dusun sedangkan di bawahnya lagi sembarang waktu dapat dibuat. Jurai tua adalah jabatan turunan. Puyang dari empat sumbay tadi mempunyai turunan jurai tua. Biasanya jurai tua adalah anak pertama. Tugas jurai tua tidak berkaitan dengan pemerintah, hanya jurai tua harus mengurus suasana desa. Misalnya ada keributan, soal cocok tanam, soal bujang gadis, soal pelanggaran adat, dan sebagainya. Jurai tua tahu benar waktu-waktu untuk bercocok tanam (ini biasanya ada semacam pegangan bagi jurai tua). Islam masuk ke daerah Pasemah sekitar 1800-an.

Asal usul desa Bumi Agung/Marga Bumi Agung :

Dusun Bumi Agung adalah masyarakat yang berpindah dari desa Tanjung Keling pada tahun 1902. Pada awal 1902 nenek Semiun diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai kontrolir yang berkedudukan di kota Bandar. Menurut perintah, pesirah harus membawa rakyatnya pindah dari dusun Tanjung Keling. Karena pada waktu itu nenek Semiun telah menjabat sebagai pesirah maka untuk sementara pindah ke Desa Muara Siban. Kurang lebih diujung tahun 1902 masyarakat Desa Tanjung Keling pindah ke Desa Bumi Agung. Maka pesirah Marga Bumi Agung disebut Perirah Sumbay Mangku Anom Suku Muara Siban di Bumi Agung atau disebut Marga Bumi Agung saja.

Kemudian nenek Semiun menjabat pesirah dari tahun 1902–1921. Tahun 1921 jabatan pesirah diberikan pada anaknya yang bernama Leman. Leman menjabat pesirah dari tahun 1921 sampai 1927 dengan gelar Singalaga. Setelah itu tidak ada catatan tahun lagi tetapi jabatan pesirah diwariskan lagi pada anak nenek Semiun yang ketiga, Sintuhan, lalu pada Mohammad Toyib (mantu nenek Semiun), kemudian diberikan pada anak nenek Semiun lagi yaitu Mansyur yang juga bergelar Singalaga. Habislah bagian nenek sekitar tahun 1935. Setelah itu pesirahnya Al Rahaman dari dusun Sukarani. Pesirah kemudian adalah pesirah yang ditunjuk sebagai pejabat, lalu diikuti oleh pesirahnya Tohir, lalu Sapri yang merupakan anak Leman yang menjabat pesirah selama 14 tahun. Setelah itu turun Undang-undang pemerintahan desa dan mulai hapusnya sistem marga.

Puyang-puyang orang Pasemah sebenarnya termasuk dewa-dewa, ada cerita-cerita orang tua bahwa puyang orang Pasemah yang datangnya dari Jawa, kalau tidak salah Atung Bungsu anak puyang dari Jawa Puyang Ratu Senuhun. Atung Bungsu diperintahkan untuk mengatur tanah Pasemah tempatnya di kaki gunung Dempo. Jadi datangnya dari Jawa, sampai di Palembang, di kuala Palembang, dilihatnya ada seorang perempuan yang sedang mencuci beras, dan rupanya adik perempuannya dia. Ia menanyakan kenapa dia berada di sini, katanya ia diperintahkan oleh nenek di Jawa untuk nunggu daerah Palembang ini. Ia sedang melembangkan beras, oleh karena itu disebut Air Pelembang, Pelembangan, Palembang. Atung Bungsu diperintahkan untuk mudik. Alatnya adalah timbangan emas. Apabila dalam perjalanan menemukan pertigaan sungai, timbanglah air di kedua sungai itu, mana yang lebih berat itulah jalan yang harus ditempuh. Jadi dari Musi terus mengikuti sungai Lematang. Sampai di Lematang ada lagi air besemah. Sampai di besemah ia nyuci beras untuk makan dan air sungai itu besemah. Air ada ikan semah.

Asal usul orang Guma, Pasemah dan lainnya itu berbeda, namun puyang-puyang itu berasal dari dewa. Misalnya puyang

Gumay lain nama tapi orangnya satu. Dia bukan melalui kandungan. Dia turunnya dari buah linggau. Semacam labu. Puyang itu berada dalam linggau ketika itu orang-orang mencari suara dan akhirnya menemukan suara itu, linggau dibuka dengan kuku, jadi sampai sekarang orang Gumay kukunya agak mencong. Kemudian keluarlah dia dan langsung menjadi besar.

Puyang Semidang turunnya dari Matahari. Jadi sebenarnya puyang-puyang itu cuma satu, tapi cara turunnya bermacam-macam. Tiap-tiap suku berbeda caranya.

2. Nama responden : A. Muhi Stam (60 tahun).

Bekas Pesirah Marga Sumbay Tanjung Raya Suku Muara Payang.. Saya diangkat menjadi pesirah tahun 1968 sampai 1983. Tahun 1983 dihapus sistem marga itu. Untuk propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 1 Maret 1983, seluruh pesirah dipanggil ke Palembang oleh gubernur. Sampai di sana dinyatakan bahwa seluruh marga dihapuskan. Seluruh marga dari 10 kabupaten sekitar 500 marga. Kemudian kami mendapat uang hadiah, kalau pesirah yang berasal dari pemilihan rakyat dapat pesangon Rp 100.000,00 tetapi kalau sudah pejabat-pejabat diberi Rp 50.000,00. Waktu itu dinyatakan bahwa hal-hal yang menyangkut adat, pesirah tetap berlaku dalam masyarakat. jadi kami kembali ke tempat masing-masing selaku tua-tua. Jadi kalau secara adat kita masih diakui. Ada beberapa pesirah yang kondisinya baik dengan Kepala Desa sehingga kalau terjadi sesuatu dalam masyarakat masih dilibatkan, tetapi ada pula yang tidak lagi terlibat sama sekali.

Di Muara Payang bagi saya masyarakat di sini masih memanggil saya, jadi nampaknya saya masih dibutuhkan. Dan saya juga tidak keberatan untuk dipanggil oleh masyarakat.

Pada zaman dahulu siapa yang jadi pesirah, dialah yang menjadi kepala adat. Jurai tua istilah kami di sini itu adalah perdusun dari keturunan-keturunan. Kalau Sumbay Tanjung Raya di sini itu merupakan gabungan dari dusun, siapa yang

menjabat kepala marga sekaligus ia menjadi kepala adat. Pengangkatan pesirah tidak ada upacara, karena dilantik oleh bupati atas nama gubernur yang dihadiri oleh unsur Muspida dan DPRD.

Sewaktu jadi pesirah saya mendapat uang sumbangan Rp 10.000,00 dari pemerintah per bulan yang kadang-kadang diterima tiga bulan sekali. Untuk keuangan marga dia berhak mengatur keuangan pesirah sendiri. Kemudian diadakan pajak-pajak marga yang merupakan keputusan dewan marga. Yang dipajaki adalah kepala keluarga, dari yang baru kawin sampai yang berumur 50 tahun, besarnya Rp 250,00 per tahun. Seluruh kekayaan yang ada jatuh pada Pemda berupa Ipdea (PBB). Marga terlibat dalam pengumpulan dan mendapat 10% upah pungut. Dalam hal jual beli harta benda pesirah mendapat bagian sebagai saksi, karena jual beli ditangan Camat. Sumber yang lain dari marga adalah keuangan adat, yaitu disamping pajak marga, juga ada sewa bumi bagi tumpang berladang per tahun. Dalam marga yang menangani masalah itu adalah sekretaris marga. Krio memimpin satu dusun, kalau pesirah memimpin beberapa dusun. Satu desa sekarang berarti satu dusun dulu. Sekarang dipimpin oleh Kepala Desa, kalau dulu dipimpin oleh Krio. Krio dibantu oleh dua orang Punggawa dan seorang Khotib. Khotib tugasnya hanya urusan agama, sedang krio menangani masalah umum seperti penagihan pajak, menanggulangi sengketa, dan lain-lainnya.

Pesirah dalam tugasnya dibantu oleh seorang pembarap. Apabila pesirah meninggalkan tempat, maka pembarap akan menggantikannya. Jadi susunannya secara resmi adalah pesirah lalu krio. Pesirah dibantu oleh sekretaris dan pembarap. Krio dibantu oleh dua orang punggawa dan khotib.

Sekarang walaupun saya sering dimintai tolong, tapi sifatnya sukarela, tanpa imblan apa-apa. Jadi sekarang benar-benar sebagai masyarakat biasa. Namun baru-baru ini oleh pemerintah dijadikan sebagai masyarakat biasa. Namun baru-baru ini oleh pemerintah dijadikan sebagai pembangu adat (anggota). Pemangu adat ini dipimpin oleh seorang ketua, ada

wakil dan lima orang anggota. Jadi ada tujuh orang pemangku adat. Saya bukan ketuanya, karena pada waktu itu ada mantan pesirah yang lebih tua dari saya, yaitu pesirah siola di muara jauh. Dia ketua saya wakilnya. Anggota-anggotanya adalah tua-tua di setiap dusun. Walaupun organisasinya sudah dibentuk dan jelas ususnya, namun kegiatannya tidak ada. Belum ada kegiatan apa-apa. Walaupun pada saat pembukaan ada tugas-tugas pemangku adat yang dijabarkan, tetapi ada juga pemangku adat dari tingkat kabupaten. Komunikasi ini tidak berjalan. Pemangku adat ini sebenarnya *ex marga*, ditingkat kabupaten tidak ada, jadi langsung ke tingkat II.

Jadi seolah-olah dengan adanya pemangku adat, sistem marga diaktifkan lagi, tapi keadaannya tidak seperti marga dulu. Kalau dulu marga dipimpin oleh pesirah yang juga sekaligus sebagai kepala adat. Jadi untuk memanggil warga dia punya wewenang. Sekarang dalam pemangku adat ini kita tidak berhak untuk memanggil. Jadi hanya di dusun masing-masing saja. Kalau sekarang saya tidak dapat memanggil seseorang yang bersengketa di dusun atau desa lain karena tidak mempunyai hak. Dulu untuk menanam padi, pesirahlah yang menentukan kapan dimulainya, kapan panennya, dan sebagainya. Semua aktivitas berpedoman kepada pesirah, dan pesirah berdasarkan atas Simbur Cahaya. Ini menyangkut kesepakatan di daerah Sumatera Selatan. Sedangkan waktu menanam dan pengetahuan tentang alam didapatkan dari tua-tua.

Masyarakat daerah ini asal usulnya yaitu sebelum tahun 1918 dusun kami berada di Pucuk, sekitar 5 km ke arah gunung. Kemudian pada tahun 1914 mulai bergerak pindah ke sini, sebab pada zaman Belanda kalau masyarakat yang jauh dengan jalan dikenakan dua kali kuli. Satu kali di jalan besar dan satu lagi di jalan masuk. Lalu untuk menghindari dua kali kuli itu pada tahun 1918 seluruh masyarakat pindah ke sini.

Dalam tiap-tiap marga dulu tidak tentu jumlahnya, adakalanya terdiri dari 24 dusun, tapi ada juga yang hanya 8 dusun. Jadi tidak rata harus sejumlah tertentu. Kemudian pada waktu pembentukan kepala marga yang pertama kali, dusun-dusun

yang ada itu sebenarnya dari puyang-puyang yang berbeda. Jadi dalam satu marga ada 2 atau 3 puyang. Ada Ulu Lurah, Tanjung Raya, Sumbay Besar, dan lain-lain. Oleh Belanda pertama kali pendirian marga dipertanyakan akan dijabat oleh suku mana pesirah itu. Lalu pesirah yang pertama kali menjabat, nama sukunya diangkat menjadi nama marga, seperti Sumbay Tanjung Raya Muara Payang. Sumbaynya Tanjung Raya, sukunya Muara Payang karena yang jadi pesirah pertama kali adalah orang Muara Payang.

Nama-nama marga yang ada di Pasemah :

- **Muara Payang**
- **Semas Penantian**
- **Ulu Lurah**
- **Alun Dua**
- **Pelang Keniday**
- **Lubuk Bunta**
- **Bumi Agung**
- **Pasemah Ulu Mana Ilir**
- **Pasemah Ulu Mana Ulu**
- **Tanjung Kurung**
- **Keban Jati**
- **Mula Ulu**
- **Pagar Gunung**

Pada zaman dulu wedana langsung membawahi pesirah-pesirah. Tumbuhnya kecamatan adalah sekitar tahun 1950-an. Jadi pertama bupati-camat-pesirah, lalu setelah 1083 bupati-camat-kepala desa. Ada perubahan lagi muncul dengan adanya Tugub (pembantu gubernur), misalnya di Lahat yang membawahi tiga kabupaten; Lahat, Lubuk Linggau, dan Muara Enim. Ini berjalan 1–2 tahun, kemudian bupati menurunkan lagi Tubup (pembantu bupati) yang kemudian diganti dengan Tuti (pembantu bupati). Tuti untuk kabupaten Lahat ini terdiri atas 3 wilayah yaitu Lahat, Pagar Alam, dan Tebing Tinggi. Ini merupakan tempat-tempat kontrolir zaman Belanda atau wedana di zaman kemerdekaan.

Dulu sebelum tahun 1926 dilarang kawin satu sumbay, yang melanggar akan dibuang dari dusunnya. Tapi setelah itu banyak yang dihukum keluar dusun, maka diadakanlah pertemuan yang melahirkan kesepakatan untuk membolehkan perkawinan di dalam sumbay. Pada masa kini perkawinan lebih banyak melihat ke jalur agama, selama tidak menyalahi peraturan agama bisa saja.

3. Nama responden : Dung Cik Ning, 70 tahun, ex pesirah.

Puyung saya seorang pasirah pangeran, begitu juga nenek saya. Orangtua saya pesirah, begitu pula saya. Dulu waktu saya diangkat oleh Belanda surat pengangkatannya tidak disebut umur karena pada waktu itu saya baru berumur 16 tahun. Saya lahir tahun 1922 (15 Desember). Dulu pengangkatan terjadi karena residennya setuju dengan saya, karena pada waktu itu belum banyak orang yang sekolah di HIS. Saya jadi pesirah tahun 1938. Orangtua saya pesirah juga yang bermusuhan dengan kontrolir. Dia mengusahakan agar orangtua saya berhenti, kontrolir ini mau mengangkat orangnya dia seorang klerk di kantor kontrolir. Orang kita bisa jadi klerk kalau bisa berbahasa Belanda.

Dulu saya sekolah MULO di Palembang. Saya jadi pesirah tahun 1938–1957. Dulu saya dengan gubernur Sumatera Selatan kenal, ini sekitar tahun 1958 setelah merdeka. Kebetulan asisten wedana sedang lowong. Wedana sendiri pada waktu itu dijabat oleh orang yang sudah tua. Gubernur meminta saya untuk menggantikan wedana itu. Jadi saya sebagai pesirah belum diberhentikan, saya sudah diangkat menjadi wedana yang mendahului keputusan menteri dalam negeri. Orang di sini ribut. Lima tahun menjadi asisten wedana, kemudian saya menjadi BPH (Badan Pemerintah Harian).

Daerah Tebing Tinggi dulu ada 14 pesirah kepala marga-marga :

- Wulung Dusun
- Ting Pumpung Suku Ulu

- Sikap Labuan
- Kejahatan mandi Musi Ilir
- Tanjung Raya
- Gunung Raksa
- Muara Pinang
- Muara Danau
- Babatan
- Seleman
- Karang Dapo
- Tejajin
- Padang Lai
- Ulu Musi

Pesirah memimpin marga dibantu oleh pembarap, dan di bawah pembarap ada punggawa-punggawa, lalu ada penghulu dan ketip. Tiap-tiap dusun ada ketip dan ada krio yang mengel-palai dusun. Tugas pesirah juga memeriksa orang.

Pada tahun 1979 saya pernah hadir di Unsri menghadiri rapat membahas Rapat Kecil Terbatas tentang pemerintahan marga dan keuangan marga. Penghapusan marga di Sumatera Selatan ini agak lambat karena sistem yang baru dirasakan belum cocok. Jadi sebenarnya masa kerja saja adalah 44 tahun lebih, 20 tahun diantaranya adalah menjadi pesirah.

Keuntungan sistem marga dihilangkan saya tidak tahu, tapi mungkin desa-desa menjadi banyak. Zaman sekarang kita harus perhatikan bahwa penduduk makin banyak saja, dan uang lebih banyak bicara. Sebenarnya kejujuran merupakan hal yang penting.

Pada zaman Belanda saya mendapat gaji 100 gulden, dan ditambah uang jalan 15 gulden. Di samping itu ada hasil dari kebun. Jadi dalam hal pendapatan saya tidak mendapatkan kesulitan. Dulunya penghasilan marga adalah dari upah pungut, belasting/pajak jiwa. Yang penting harus diperhatikan dalam memimpin adalah rakyat harus segan terhadap pemimpinnya. dulunya rakyat menolong pesirah kalau berladang, mereka selalu mau menolong. Dulunya juga tidak ada yang mencoba-coba untuk menyuap.

Sistem marga di daerah Tebing Tinggi sudah ada sejak zaman Sunan, sebab sudah sejak zaman dulu pengaruh Palembang telah ada di sini. Daerah Tebing Tinggi adalah daerah Palembang, sebab pesirah dulu selalu setor ke Palembang. Zaman Belanda kota Tebing Tinggi ditunggu oleh Asisten Residen.

Gelar pangeran bagi pesirah merupakan kehormatan yang diberikan Belanda kepada pesirah yang telah melaksanakan jabatannya selama 10 tahun dengan baik.

Lampiran: 3

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Daftar Tabel:

— Tabel 1:	Jumlah Penduduk Kabupaten Lahat Menurut Jenis Kelamin Per-Kecamatan	15
— Tabel 2:	Penduduk Kabupaten Lahat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	17
— Tabel 3:	Angkatan Kerja di kabupaten Lahat Tahun 1991	19

Daftar Bagan :

— Bagan 1.	1. Piramida Gugus Sosial Suku Bangsa . . .	5
— Bagan 1.	2. Lingkaran Konsentris Gugus-gugus Suku Bangsa	6
— Bagan	1. Struktur Kepemimpinan Jurai	40
— Bagan	2. Struktur Pemerintahan Belanda Sampai ke tingkat Pesirah, Kepala Marga	48
— Bagan	3. Struktur Kepemimpinan Marga di Gumat	50
— Bagan	4. Struktur Kepemimpinan Marga di Pasesmah	51
— Bagan	5. Struktur Kepemimpinan Marga di Tebing Tinggi	52
— Bagan	6. Sejarah Sistem Pemerintahan Tradisional di Lahat	53
— Bagan	7. Hierarkhi Pemerintahan Daerah Sumsel Sebelum 1 Maret 1983 dan Setelah 1 Maret 1983	63
— Bagan	8. Susunan Organisasi Lembaga Pemangku Adat	64

Lampiran : 4

PETA LOKASI PENELITIAN

